

Vol. 06 No. 02 Desember 2021

E-ISSN : 2527-4821



JURNAL MORAL KEMASYARAKATAN

Diterbitkan oleh :



PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
UNIVERSITAS PGRI KANJURUHAN MALANG
KERJA SAMA DENGAN
ASOSIASI PROFESI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN INDONESIA (AP3Knl)

JURNAL MORAL KEMASYARAKATAN

VOLUME 6 NOMOR 2 Desember 2021

Jurnal Moral Kemasyarakatan terbit 2 kali dalam setahun pada bulan Juni dan Desember. Berisi tulisan yang diangkat dari hasil penelitian bidang moral, nilai, karakter dan berbagai tindakan yang memiliki dampak positif dalam segala bidang kehidupan masyarakat. ISSN 2527-4821 (Online).

Editor in Chief

Andri Fransiskus Gultom, Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, Indonesia

Managing Editor

Ludovikus Bomans Wadu, Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, Indonesia

Editor

Kususanto Ditto Prihadi, HELP University, Malaysia

Suciati, Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, Indonesia

Khoirul Bariyah, Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, Indonesia

Fauzi Abdillah, Universitas Negeri Jakarta, Indonesia

Meidi Saputra, Universitas Negeri Malang, Indonesia

Ade Engkus Kusnadi, Institut Teknologi Bandung, Indonesia

Bhakti Prima Findiga Hermuttaqien, Universitas Negeri Makassar, Indonesia

Peer Reviewers

Solihin Ichas Hamid, Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia

Mohammad Mona Adha, Universitas Lampung, Indonesia

Theodorus Pangalila, Universitas Negeri Manado, Indonesia

Yuyus Kardiman, Universitas Negeri Jakarta, Indonesia

Hipolitus Kristoforus Kewuel, Universitas Brawijaya, Indonesia

Yuventia Prisca D. Todalani Kalumbang, Universitas Bina Nusantara, Indonesia

Nurul Febrianti, Universitas Esa Unggul, Indonesia

Yogi Nugraha, Universitas Buana Perjuangan Karawang, Indonesia

Beny Dwi Lukitoaji, Universitas PGRI Yogyakarta, Indonesia

Erwin Susanto, Universitas Buana Perjuangan Karawang, Indonesia

Alamat Penyuntingan dan Pelaksana Administrasi:

Laboratorium Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan,
Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, Gedung H Lantai 3,
Jl. Supriyadi No 48 Kota Malang 65148. Email : jmk@unikama.ac.id

Editorial

Pembaca yang budiman, pada edisi Volume 6 Nomor 2 kali ini Jurnal Moral Kemasyarakatan menerbitkan naskah hasil penelitian dalam bidang moral, nilai, karakter dan berbagai tindakan yang memiliki dampak positif dalam segala bidang kehidupan masyarakat. Berikut secara singkat naskah naskah yang diterbitkan dalam edisi kali ini.

Artikel pertama ditulis oleh **Lusiana Rahmatiani & Nadya Putri Saylendra** dengan judul Pembentukan Civic Disposition Peserta Didik Berbasis Kompetensi Abad 21. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi pembentukan karakter peserta didik berbasis kompetensi abad ke 21 dengan pola habituasi dilakukan oleh guru kepada peserta didik dalam kegiatan pembelajaran pada masa pandemi dengan tujuan memunculkan kesadaran pentingnya karakter dalam menjalankan segala aktivitas kehidupan. Tatanan pola kehidupan masyarakat mengalami pergeseran paradigma, menimbulkan banyak permasalahan yang harus dihadapi peserta didik. Tantangan abad ke 21 menuntut untuk menyiapkan peserta didik yang memiliki karakter berbasis kompetensi abad ke 21 agar mampu menjawab, beradaptasi serta bergaul dengan segala dinamika yang disuguhkan oleh pengaruh globalisasi.

Artikel kedua ditulis oleh **Dedi Kusuma Habibie, Muhammad Kamil, Danang Kurniawan, Salahudin, & Umi Kulsum** dengan judul Narrative Policy Framework: The Role of Media Narratives on Alcohol Investment Policy in Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa respon naratif publik terhadap Kebijakan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal mendapat tanggapan yang beragam dari masyarakat dan organisasi masyarakat. Dalam gerakan sosial melalui narasi kebijakan penolakan investasi miras di Indonesia, masyarakat terbagi menjadi kelompok-kelompok besar, antara lain LSM, LSM, dan ormas keagamaan. Penolakan tersebut memiliki substansi naratif terkait dengan nilai-nilai yang menjadi dasar penolakan, diantaranya merusak moral anak bangsa, yaitu pemuda sebagai generasi penerus bangsa, dalam upaya membangun karakter bangsa (nation and character building) akibatnya, intensitas kejahatan di masyarakat akan meningkat. Selain itu, penolakan tersebut juga mendapat legitimasi yang kuat dari berbagai aktor yang membuat masyarakat ikut terlibat mendukung gerakan penolakan investasi miras.

Artikel ketiga ditulis oleh **Dadang Sundawa & Ludovikus Bomans Wadu** dengan judul Implementasi Nilai Karakter Religius dalam Tradisi Bersih Desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi nilai karakter budaya bangsa dalam tradisi bersih desa khususnya nilai karakter religius sebagai berikut; (1) sebagai bentuk ungkapan rasa syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa atas karunia yang telah diberikannya kepada warga desa pada umumnya, (2) Sebagai ungkapan rasa terima kasih kepada leluhur desa yang telah “babad alas” atau bedah krawang di desa tersebut, sehingga mereka semua saat ini bisa menempati dan berkehidupan di desa tersebut, (3) Sebagai perwujudan kepercayaan atas adanya kekuatan alam yang tidak kasatmata yang melindungi desa tersebut seisinya yang diyakini dan disimbolkan sebagai pundhen, (4) Sebagai bentuk keinginan dan harapan untuk menolak segala bala’ atau sengkolo seperti penyakit, mara bahaya, prahara, tragedi. (5) Sebagai bentuk upaya nguri-uri budaya warisan nenek moyang yang penuh nilai kearifan local, (6) Sebagai bentuk ungkapan rasa sukacita dan kegembiraan warga masyarakat atas segala yang telah

diperolehnya dalam satu tahun yang telah berjalan (hasil pertanian, perdagangan, keterampilan).

Artikel keempat ditulis oleh **Lisye Salamor dan Samuel Patra Ritiauw**. Dengan judul Penguatan Karakter Moral Siswa Berbasis Sistem Pendukung Keputusan dengan Metode Simple Additive Weighting. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahap analisis, karakter moral dapat diukur secara akuntabel dengan laporan pengamatan perilaku oleh guru. Pada tahap design, terbentuk rancangan sistem penentuan keputusan dari indikator karakter utama program Penguatan Pendidikan Karakter. Tahap development mengembangkan sistem penilaian karakter dengan program Sistem Pendukung Keputusan menggunakan metode SAW. Tahap implementasi dan evaluasi di Sekolah Dasar Negeri Randusari diketahui bahwa sistem tersebut dapat dioperasikan dengan mudah oleh guru tanpa mengalami hambatan teknis. Implementasi pengembangan sistem memudahkan guru menilai karakter siswa. Akses sistem terbuka bagi kepala sekolah dan orangtua siswa menjadi dasar pelaksanaan peran mereka dalam pembentukan karakter moral siswa baik di sekolah maupun di rumah.

Artikel kelima ditulis oleh **Ravyansah & Fauzi Abdillah** dengan judul Tracing 'Profil Pelajar Pancasila' Within The Civic Education Textbook: Mapping Values For Adequacy. Hasil penelitian menunjukkan bahwa muatan nilai karakter Profil Pelajar Pancasila dengan pola tersebar dan pembobotan yang beragam. Dalam upaya mendukung terwujudnya Profil Pelajar Pancasila, penelitian ini merekomendasikan pemerintah untuk menyesuaikan konten dan muatan agar lebih representatif serta relevan dengan capaian pembelajaran yang terbaru.

Demikian paparan singkat dari edisi Jurnal Moral Kemasyarakatan edisi ini. Kiranya berbagai hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan keilmuan bidang nilai, moral dan karakter serta berbagai tindakan yang memiliki dampak positif dalam segala bidang kehidupan masyarakat. Selamat membaca.

Malang, 31 Desember 2021

Andri Fransiskus Gultom
Chief in Editor Jurnal Moral Kemasyarakatan
Universitas PGRI Kanjuruhan Malang

Daftar Isi

Pembentukan Civic Disposition Peserta Didik Berbasis Kompetensi Abad 21.....	54-63
Lusiana Rahmatiani, Nadya Putri Saylendra	
Narrative Policy Framework: The Role of Media Narratives on Alcohol Investment Policy in Indonesia	64-76
Dedi Kusuma Habibie, Muhammad Kamil, Danang Kurniawan, Salahudin, Umi Kulsum	
Implementasi Nilai Karakter Religius dalam Tradisi Bersih Desa	77-82
Dadang Sundawa, Ludovikus Bomans Wadu	
Penguatan Karakter Moral Siswa Berbasis Sistem Pendukung Keputusan dengan Metode Simple Additive Weighting.....	83-95
Selly Rahmawati, Setia Wardani	
Tracing 'Profil Pelajar Pancasila' Within The Civic Education Textbook: Mapping Values For Adequacy.....	96-105
Ravyansah Ravyansah, Fauzi Abdillah	

Pembentukan Civic Disposition Peserta Didik Berbasis Kompetensi Abad ke 21

Lusiana Rahmatiani ^{a,1*}, Nadya Putri Saylendra ^{b,2}

^{ab} Universitas Buana Perjuangan Karawang, Indonesia

¹ lusiana.rahmatiani@ubpkarawang.ac.id

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 14 November 2021;

Revised: 7 Desember 2021;

Accepted: 31 Desember 2021

Kata-kata kunci:

Civic Disposition;

Peserta Didik;

Kompetensi abad ke 21.

: ABSTRAK

Peradaban baru menyuguhkan kemajuan teknologi bisa membuat degradasi moral yang disebabkan pengaruh globalisasi dengan berkembangnya berbagai media sosial yang berdampak bagi peserta didik. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji pembentukan karakter dengan berbasis situasi di abad ke 21. Karakter tersebut sangat diperlukan untuk dapat menjawab tantangan kehidupan abad ke 21. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yang berupaya menjelaskan dengan rinci permasalahan yang diteliti dengan mengkaji mengenai individu ataupun kelompok. Implementasi pembentukan karakter peserta didik berbasis kompetensi abad ke 21 dengan pola habituasi dilakukan oleh guru kepada peserta didik dalam kegiatan pembelajaran pada masa pandemi dengan tujuan memunculkan kesadaran pentingnya karakter dalam menjalankan segala aktivitas kehidupan. Tatanan pola kehidupan masyarakat mengalami pergeseran paradigma, menimbulkan banyak permasalahan yang harus dihadapi peserta didik. Tantangan abad ke 21 menuntut untuk menyiapkan peserta didik yang memiliki karakter berbasis kompetensi abad ke 21 agar mampu menjawab, beradaptasi serta bergaul dengan segala dinamika yang disuguhkan oleh pengaruh globalisasi.

ABSTRACT

The Establishment of Civic Disposition competency-based learners in the 21st Century. *The new civilization presenting technological advances can create moral degradation caused by the influence of globalization with the development of various social media that have an impact on learners. The purpose of this study is to examine character formation based on situations in the 21st century. These characters are indispensable to be able to answer the challenges of 21st century life. This research uses qualitative descriptive methods, which attempt to explain in detail the problems studied by reviewing individuals or groups. Implementation of character formation of 21st century competency-based learners with habituation patterns is carried out by teachers to learners in learning activities during pandemics with the aim of raising awareness of the importance of character in carrying out all life activities. The order of people's life patterns undergoes a paradigm shift, causing many problems that must be faced by learners. The challenges of the 21st century demand to prepare learners who have a competency-based character in the 21st century to be able to answer, adapt and get along with all the dynamics presented by the influence of globalization.*

Keywords:

Civic Disposition;

Learners;

Competence of the 21st

Century.

Copyright © 2021 (Lusiana Rahmatiani & Nadya Putri Saylendra). All Right Reserved

How to Cite : Rahmatiani, L., & Saylendra, N. P. (2021). Pembentukan Civic Disposition Peserta Didik Berbasis Kompetensi Abad 21. *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, 6(2), 54-63. <https://doi.org/10.21067/jmk.v6i2.6216>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Kemajuan teknologi mendesak kesadaran para pendidik pada perubahan dalam dunia pendidikan terutama pada pembentukan watak warga negara (*civic disposition*). Budimansyah (2015), mengatakan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memiliki peranan penting dalam pembangunan karakter bangsa sebagai pedoman dalam program kulikuler pendidikan formal maupun pendidikan non formal. Pendidikan menjadi penopang utama meningkatkan sumber daya manusia Indonesia dalam pembangunan bangsa. Sumber daya manusia Indonesia yang hendak ditingkatkan tidak terlepas fokus pada adanya penguatan karakter bangsa yang menjadi fundamen dalam *national character building*. Pembentukan karakter diperlukan dengan basis kompetensi abad ke 21 yang harus dimiliki oleh peserta didik yang terfokus pada dunia pendidikan (Surani, 2019).

Degradasi moral yang disebabkan oleh pengaruh globalisasi dengan ditandai berkembangnya berbagai media sosial yang sudah menjadi bagian dari gaya hidup modern manusia yang terserap cepat oleh peserta didik sebagai generasi muda bangsa. Daulay (2012), mengatakan bahwa adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) memiliki konsekuensi sangat logis dalam terciptanya kondisi yang mencerminkan adanya degradasi moral. Pembentukan *civic disposition* menjadi porsi utama dalam berbagai fokus bidang kehidupan terutama pada bidang pendidikan. Urgensi *civic disposition* dalam pendidikan terutama untuk menjadikan peserta didik menjadi warga yang bisa memiliki jati diri berbangsa dan bernegara dengan adanya keutamaan menjaga diri dari pengaruh negatif akibat adanya kemajuan teknologi. Beberapa indikasi negatif dari teknologi media sosial seperti berita bohong (*hoax*), *bullying*, *hate speech* perlu diantisipasi dengan pembentukan *civic disposition* (Khoirot, dkk., 2019).

Kemajuan teknologi menandai peradaban baru yang ditandai dengan perubahan yang sangat cepat. Perubahan yang terjadi menyangkut segala aspek kehidupan dalam berbagai bidang kehidupan terutama bidang pendidikan, dengan adanya perubahan yang sangat signifikan pada dunia pendidikan maka peserta didik dituntut untuk mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan harus mampu menguasai kompetensi abad ke 21. Kompetensi abad ke 21 menjadi kompetensi penting yang harus dimiliki oleh setiap peserta didik agar dapat menghadapi kehidupan nyata. Griffin, P., McGaw, B., & Care (2012), menjelaskan mengenai kompetensi abad ke 21 yang dibagi 4 jenis yaitu: *way of thinking, way of working, tools for working dan skills for living in the world*. Pengembangan kompetensi abad ke 21 harus dilakukan secara masif oleh pendidik agar dapat mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Penyesuaian kemajuan teknologi harus diimbangi dengan kecakapan hidup manusia dalam memperkokoh karakter bangsa Indonesia berbasis kompetensi abad ke 21.

Pengaruh globalisasi menjadi wujud suatu era baru yang menuntut kemampuan manusia melakukan beberapa kumpulan mengenai berbagai informasi yang menjadi satu kesatuan dalam suatu proposisi pengetahuan yang diimbangi dengan kecakapan hidup. Subijanto (dalam Mukhadis, 2013) menyatakan bahwa adanya pergeseran tuntutan pola kehidupan yang diidentifikasi oleh kebiasaan terkait dengan, pertama, pola pikir, pola tindak, dan pola sikap. Kedua, upaya pemenuhan kebutuhan. Ketiga, pemanfaatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (ipteks). Keempat, ranah dan tingkat kompetensi. Kelima, budaya dalam upaya untuk survival. Pergeseran yang terjadi berimplikasi pada pergeseran pola hidup individu, masyarakat, bangsa dan negara yang memiliki dampak pada pergeseran moral

sehingga akan menimbulkan krisis moralisasi pada pelbagai bidang kehidupan, oleh sebab itu sangat dibutuhkan pembentukan karakter peserta didik dengan basis kompetensi abad ke 21.

Metode

Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif dengan pendekatan metode kualitatif. Metode penelitian berlandaskan pada *postpositivisme* yang memahami realitas sesuai dengan hukum alam. Penelitian deskriptif kualitatif memiliki tujuan untuk menjelaskan dan atau menggambarkan dengan rinci permasalahan yang diteliti dengan mengkaji mengenai individu ataupun kelompok pada tujuan penelitian. Manusia menjadi instrumen dalam sebuah penelitian kualitatif (Sugiyono, 2016). Partisipan dalam penelitian ini meliputi guru mata pelajaran PPKn dan siswa/i Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Karawang. Pengumpulan data yang dilakukan dengan tiga kategori yaitu observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan tiga langkah yang dilakukan bersamaan yaitu dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Adapun subjek dalam penelitian ini terdiri dari manusia, proses dan latar. Penentuan ketiga kategori berdasarkan pandangan Alwasilah, (2012) mengatakan bahwa pada pemilihan sampel tidak hanya menerapkan pada manusia sebagai responden, tetapi juga latar serta kejadian dapat dijadikan sebagai sampel penelitian. Untuk subjek penelitian berunsur manusia untuk dijadikan responden, peneliti membagi ke dalam dua unsur yaitu guru dan siswa terseleksi berdasarkan tugas dan fungsi yang dimilikinya sehingga dianggap dapat membantu memberikan sejumlah informasi mengenai keterkaitan dengan penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Implementasi pembentukan *civic disposition* peserta didik berbasis kompetensi abad ke 21 di era pandemi mengalami pelbagai hambatan yang tidak dapat ditolak, dapat disepakati bersama bahwa pada prinsipnya dalam kegiatan pembelajaran pendidik sudah tentu memberikan *transfer knowledge* tetapi dibutuhkan lebih daripada itu yaitu suatu pembentukan nilai karakter pada peserta didik yang memiliki beragam karakteristik yang sangat kompleks, sulit tentunya jika tidak diimbangi dengan kompetensi lainnya yang dapat menunjang pembentukan *civic disposition* peserta didik sesuai dengan yang diharapkan (Mahendra, 2017).

Perihal yang diharapkan dalam pelaksanaan pembentukan karakter di sekolah. Karakter dibentuk oleh pola perilaku yang didasari pada dimensi moral yang baik bukan dimensi moral buruk yang ada pada diri seseorang (Budiwibowo, 2016). Sejalan dengan hal tersebut dalam hal mengintegrasikan nilai karakter kepada siswa dalam kegiatan belajar berarti mentautkan atau menerapkan nilai-nilai kebaikan dan kebenaran dalam membentuk serta membina karakter kepribadian siswa sesuai dengan jati diri bangsa (Sari et al., 2019).

Pembentukan karakter di era revolusi industri 4.0 membawa kemajuan teknologi sangat dibutuhkan dalam lingkungan pendidikan formal untuk membentuk pola sikap dan pola tindak peserta didik pada ranah delapan belas karakter bangsa dengan basis kompetensi abad ke 21. Hal ini sangat penting dilakukan mengingat kemajuan teknologi yang syarat dengan berbagai kemudahan dalam mengakses segala sesuatu yang dapat mewarnai pelbagai bidang kehidupan. Dunia pendidikan dengan demikian harus mampu berdampingan dengan kemajuan teknologi untuk melahirkan generasi penerus bangsa yang mampu *survive* dalam hidupnya dengan dibekali watak (karakter) peserta didik, jika watak peserta didik tidak dibentuk sedini mungkin maka kecanggihan teknologi akan menjadi pisau bermata dua yang memiliki dua sisi yaitu sisi

baik dan sisi negatif dimana sewaktu-waktu menjadi bom waktu bagi para peserta didik sebagai pemuda generasi penerus bangsa.

Peserta didik merupakan bahan mentah yang dapat diproses dalam transformasi dan internalisasi untuk dapat menepati posisi penting dalam menemukan sebuah proses keberhasilan. Peserta didik merupakan makhluk individu yang mempunyai kepribadian dengan ciri khas berbeda sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangannya. Pertumbuhan dan perkembangan peserta didik dipengaruhi oleh lingkungan dimana ia berada (Ramayulis & Samsul Nizar, 2010). Terkait akan hal itu *civic disposition* sangat erat kaitannya dengan pembentukan karakter peserta didik yang harus dipersiapkan secara matang dan dibekali moral yang baik sehingga dapat menjadi *good be citizenship* agar dapat ikut berperan aktif dalam kehidupan (Rahmatiani & Indriyani, 2020). Pembentukan karakter peserta didik, dengan demikian sangat diperlukan sebagai generasi penerus bangsa yang akan membawa bangsa kearah yang lebih baik.

Pembentukan karakter peserta didik berbasis kompetensi abad ke 21 salah satunya masuk pada proses pembelajaran dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) sebagai wahana pembentukan karakter anak bangsa yang memiliki tugas untuk membina peserta didik pada jalur pendidikan formal yang menjadi bagian dari tujuan pendidikan nasional (Widiatmaka, 2016). Karakter peserta didik yang dibentuk sekolah mengarah pada indikator 18 karakter bangsa indonesia dalam mendukung *national character building*. Tiga kompetensi peserta didik sebagai warga negara yang harus dikuasai yaitu: pertama *civic knowledge* yang berkaitan dengan yang harus diketahui sebagai pengetahuan seorang warganegara. Kedua, *civic skill* berkaitan dengan kecakapan intelektual seorang warganegara. Ketiga, *civic disposition* berkaitan dengan watak atau karakter seorang warganegara. Tujuan *civic disposition* yaitu menumbuhkan karakter warganegara meliputi karakter privat seperti; tanggungjawab moral, disiplin diri, dan penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia dari setiap individu, maupun karakter publik misalnya; kepedulian sebagai warga, kesopanan, mengindahkan aturan main (*rule of law*), berpikir kritis, dan kemauan untuk mendengar, bernegosiasi dan kompromi (Branson, 1999).

Terkait dengan hal di atas, dapat disampaikan bahwa pembentukan civic disposition peserta didik sangat diperlukan di era kebaruan teknologi yang disertai adanya pandemi Covid-19 yang dimana tidak bisa dipisahkannya antara kegiatan pembelajaran peserta didik dengan aktivitas yang penggunaannya bersifat digital harus dibarengi dengan pengawasan serius yang dilakukan pendidik untuk tetap mengawasi penggunaan teknologi diarah yang positif dengan maraknya aplikasi yang sangat mudah diakses dan menawarkan begitu ragamnya kesenangan permainan dan mengesampingkan edukasi. Kondisi ini dapat menimbulkan masalah baru yang akan dihadapi bangsa Indonesia jika tidak ada perhatian mengenai pembentukan karakter peserta didik. Hendak pada saatnya akan menambah rumit permasalahan dalam pembentukan karakter peserta didik yang sejatinya lambat laun akan mengalami dekarakterisasi dengan ditandai berbagai penyimpangan moral, penyimpangan sikap, penyimpangan perilaku peserta didik kearah kebebasan akses media sosial yang dapat menimbulkan dekandansi moral ke arah yang lebih serius dimana persoalan timbul bersumber pada rendahnya kualitas sumber daya manusia.

Sekolah SMAN 5 Karawang sebelum pandemi Covid-19 hadir ke Indonesia, sudah memiliki kegiatan yang merujuk pada pembentukan karakter dengan program pembinaan mental yang dibina oleh guru agama untuk membentuk mental peserta didik dengan tujuan

untuk membentuk kecerdasan spiritual peserta didik yang diharapkan dengan bekal itu perwujudannya tercermin dalam sikap dan tindakan dengan wujud peserta didik yang memiliki karakter baik dengan bekal pembentukan moral. Pembinaan karakter sebelum era pandemi juga sudah dilakukan bagi siswa yang datang terlambat masuk sekolah oleh anggota kodim karawang, dimana sekolah bekerjasama dengan kodim dalam menangani pembinaan karakter peserta didik hal ini dibutuhkan agar kedisiplinan peserta didik dapat terwujud dengan baik. Akan tetapi, percakapan mengenai pembentukan civic disposition peserta didik pada saat ini merupakan hal yang harus diterapkan pada kegiatan pembelajaran, bahwa pembentukan civic disposition peserta didik berbasis kompetensi abad ke 21 dapat bersinergis dengan tepat dikarenakan pada era revolusi industri 4.0 dan era pandemi Covid-19 proses kegiatan pembelajaran menggunakan sistem pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang sangat bergantung pada teknologi atau dikenal dengan sistem daring (dalam jaringan) dengan tuntutan melek teknologi sehingga memaksa peserta didik harus memiliki kompetensi abad ke 21 yang meliputi berpikir kritis, kreatif, komunikasi dan kerjasama. Situasi abad ke 21 menuntut peserta didik harus menguasai kompetensi baik hard skill maupun soft skill dengan inti subjek kompetensi abad ke 21 yaitu: learning and innovation skills, Information, media, and technology skills, life and career skills (Trilling & Fadel, 2009).

Upaya merujuk fokus pada kompetensi abad ke 21 menurut Trilling & Fadel (2009), pertama pembahasan fokus pada kompetensi abad ke 21 yang berkaitan dengan learning and innovation skills menjadi suatu tujuan dalam proses pembelajaran dimana pendidik menyuguhkan suatu inovasi pembelajaran yang dapat membentuk karakter peserta didik ke arah yang lebih disiplin dan bertanggungjawab dengan menggunakan model ataupun metode pembelajaran yang dapat disesuaikan pada saat pandemi dengan sistem pembelajaran daring yang mengharuskan adanya keterampilan berinovasi dalam pemilihan media online learning untuk dapat mendukung proses pembelajaran. Upaya pembentukan civic disposition berbasis kompetensi abad ke 21 pada era pandemi dalam proses kegiatan pembelajaran sejauh ini menggunakan model habituasi yang sangat mendukung dalam pembentukan karakter.

Pembentukan karakter berbasis kompetensi abad ke 21 terkait learning and innovation skills dapat dilatih dari segi berpikir kritis untuk melatih peserta didik agar mampu berpikir secara mendalam, menganalisis, mengevaluasi dan menciptakan sesuatu dalam setiap kegiatan pembelajaran dimana siswa dituntut untuk berpikir secara higher order thinking skill (HOTS), agar dapat membentuk peserta didik yang memiliki kemampuan dan kecakapan yang aktif, kreatif dan inovatif dalam setiap kegiatan pembelajaran. Proses pembelajaran peserta didik dituntut untuk mampu memecahkan masalah dan mampu menemukan solusi untuk sebuah permasalahan (Dewi, & Jatningsih, 2015). Hal tersebut bagi peserta didik dapat membuat sebuah keputusan dengan melakukan pertimbangan disertai dengan melakukan analisis dan juga evaluasi dalam segala informasi yang kemudian dapat diambil sebuah kesimpulan atau keputusan dalam setiap kegiatan pembelajaran. Hal ini dilakukan untuk menciptakan suatu pembiasaan pada peserta didik dalam mengambil setiap keputusan atau menemukan sebuah solusi pada permasalahan dengan melakukan tindakan berpikir kritis hingga membentuk indikator karakter pada peserta didik diantaranya mampu mandiri, tanggungjawab, rasa ingin tahu, mampu dalam penentuan diri, penentuan prespektif, pengambilan keputusan serta pengendalian diri dalam penentuan suatu keputusan. Hal tersebut membutuhkan adanya keterampilan inovasi dalam proses pembelajaran untuk pembentukan karakter peserta didik

dengan upaya pembiasaan dan pemilihan model pembelajaran yang harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi pada saat pembelajaran *daring*.

Kedua pembahasan fokus pada kompetensi abad ke 21 yang berkaitan dengan *information, media, and technology skills* menjadi suatu tujuan dalam pencapaian sekolah dalam mendukung penggunaan teknologi sehingga dapat mempercepat segala aktivitas yang dikendalikan dengan kecanggihan teknologi yang tidak terbatas ruang dan waktu. Keterangan yang diungkapkan oleh guru mengenai upaya pembentukan karakter berbasis kompetensi abad ke 21 dari segi informasi, komunikasi dapat dilihat dari beberapa hal pada kegiatan pembelajaran di era pandemi, dimana guru dan siswa melakukan komunikasi baik dengan pemberian informasi dalam grup whatsapp untuk membiasakan peserta didik disiplin tepat waktu pada saat pertemuan di aplikasi zoom sehingga tidak hanya transfer knowledge yang mereka dapatkan pada saat pembelajaran *daring* tetapi tetap dengan adanya pembiasaan tepat waktu masuk kelas via zoom untuk melakukan tatap maya, mereka akan memiliki kedisiplinan dan kesadaran mengenai pentingnya sekolah walaupun dengan kondisi yang berbeda, untuk perihal pengumpulan tugas pun guru membiasakan dikumpulkan tepat waktu sehingga akan menumbuhkan rasa tanggungjawab yang tinggi pada siswa untuk tetap belajar di rumah dengan sungguh-sungguh. Guru memberikan nasihat secara berulang-ulang dalam memberikan arahan kepada peserta didik saat mereka hendak menghubungi guru untuk memperhatikan waktu, sopan santun dalam tata bahasa ketika mengirim pesan hal ini dapat disepakati. Adanya pembiasaan diri sebagai pembentukan karakter sehingga akan memunculkan indikator karakter disiplin, tanggungjawab, kesadaran dan pengetahuan akan nilai moral yang baik yang tercermin pada setiap peserta didik agar mampu untuk mengelola dirinya dalam situasi dan kondisi apapun (Gultom, Munir, & Ariani, 2019).

Upaya pembentukan *civic disposition* berbasis kompetensi abad ke 21 dalam pembentukan karakter berbasis kompetensi abad ke 21 dari segi kreativitas penggunaan media teknologi dalam mengelola keterampilan peserta didik. Hal itu untuk menggunakan media teknologi yang dapat menunjang dalam proses pembelajaran dapat dilihat dari penugasan yang guru berikan untuk mengasah kreativitas peserta didik. Selain itu, peserta didik mampu dan ramah dalam menggunakan teknologi yang sejatinya menyuguhkan berbagai kemudahan yang bisa diakses dengan beragamnya media yang dapat digunakan oleh peserta didik untuk mendukung pembentukan karakter kreatif, mandiri, kerja keras dan peduli sosial yang tersinkronisasi dengan tugas berkala. Guru memberikan tugas dalam penggunaan instagram, YouTube, ataupun tiktok yang diarahkan pada konten pendidikan yang bersifat positif seperti pembuatan poster digital yang dapat menggunakan instagram untuk media sosialnya. Pembahasan mengenai suatu teori atau contoh yang dibuat oleh peserta didik dengan tepat dan tidak bertele-tele dengan membuat konten tiktok yang bermakna, juga membuat video yang berkaitan dengan ranah pendidikan yang bisa diupload di YouTube hingga dapat dinikmati dengan mudah oleh khalayak ramai sehingga penggunaan media sosial yang dimiliki peserta didik.

Penggunaan media tidak hanya melulu untuk hal hura-hura atau semata bersifat negatif tetapi dibentuk kesadaran teknologi dalam penggunaan media sosial untuk mendukung dari segi keterampilan kreativitas peserta didik. Proses pembelajaran dalam penggunaan media sosial ke ranah yang positif sehingga peserta didik mampu menyadari bahwa media sosial yang mereka miliki bisa berguna untuk hal yang positif serta dapat mengasah tanggungjawab dengan membuat konten tugas ataupun poster digital yang dapat dipertanggungjawabkan diranah

publik. Hal tersebut bisa memunculkan indikator karakter kreatif, tanggung jawab, komunikatif, mandiri, toleransi, peduli sosial, empati dan mampu mengendalikan diri dengan kompetensi yang dimilikinya dengan keterkaitan mampu mengkaji suatu informasi, kesadaran dalam penggunaan media sosial yang bijak dan mampu memiliki keterampilan dalam penggunaan teknologi.

Ketiga, pembahasan fokus pada kompetensi abad ke 21 yang berkaitan dengan life and career skills. Upaya pembentukan karakter berbasis kompetensi abad ke 21 dari segi life and career skills membutuhkan adanya pembiasaan dan pembentukan kerjasama. Hal tersebut dapat dilihat dari penyelesaian tugas-tugas yang diberikan melalui tugas kelompok baik yang bersifat kelompok kelas ataupun pembagian kelompok kecil dalam penyelesaian sebuah tugas yang diberikan oleh guru, contoh penyelesaian tugas pembuatan video atau konten kreatif dengan tepat waktu dan rapinya dalam penyelesaian tugas. Hal tersebut bisa menandakan adanya kerjasama yang baik antara anggota kelompok dengan menurunkan ego dirinya masing-masing, mereka mampu bekerja secara efektif dengan tim yang notabene tentunya memiliki karakteristik yang berbeda. Mereka dituntut menanggung tanggung jawab secara bersama sehingga penyelesaian tugas dapat diselesaikan dengan baik. Adanya kehendak dan tujuan yang sama dalam menyelesaikan tugas bersama sehingga akan memunculkan indikator karakter tanggungjawab, komunikatif, bersahabat, empati, kreatif, dan kerendahan hati untuk mengalah demi mewujudkan penyelesaian pengerjaan tugas bersama yang dapat terangkul dengan baik dalam suatu penyelesaian yang membutuhkan kerjasama dan kolaborasi yang baik antar peserta didik. Hal ini dapat bermanfaat agar mereka mampu survival dalam hal hidup dan karirnya dengan memiliki keterampilan yang mumpuni dalam dirinya untuk masa depan.

Implementasi pembentukan civic disposition peserta didik pada era pandemi tidak hanya terbatas pada sebuah wacana ataupun pembicaraan semata tetapi diperlukan tindakan nyata yang dilakukan pendidik khususnya dalam konteks ini guru PPKn sekolah SMAN 5 karawang pada pembelajaran daring yang menjadi tolak ukur dalam cerminan pada setiap proses pembelajaran untuk bekal peserta didik pada kehidupan sehari-hari baik dilingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah. Sinergitas antara orang tua dan guru dalam pembentukan karakter di era pandemi menjadi fokus utama dalam membentengi peserta didik untuk tetap memiliki karakter baik. Martini, (2018) mengungkapkan bahwa karakter erat kaitannya pada pribadi setiap individu, sehingga seseorang dikatakan baik artinya memiliki karakter baik yang sudah pasti terwujud menjadi seorang warga negara yang baik dengan akhlak yang mulia. Upaya membentuk karakter peserta didik memerlukan upaya salah satunya dengan kegiatan sekolah formal dalam proses kegiatan pembelajaran yang mengintegrasikan kemampuan peserta didik mengenai kemampuan literasi lama dan literasi baru, memiliki pengetahuan yang luas, memiliki keterampilan dan sikap yang baik serta mampu menggunakan teknologi (Kemendikbud, 2017). Pembentukan karakter peserta didik pada era revolusi industri 4.0 dan era pandemi Covid-19 harus bersinergis dengan kompetensi abad ke 21 yang dapat mendorong siswa untuk mampu memecahkan masalah yang dihadapinya dan mampu mengembangkan kreativitasnya untuk bekal dimasa depan. Proses pembelajaran daring yang dilakukan mengacu pada model, metode ataupun media online learning yang digunakan oleh pendidik pada masa pandemi dengan penyesuaian situasi dan kondisi dengan tetap membangun pembentukan civic disposition peserta didik dengan basis kompetensi abad ke 21 yang tercermin dalam setiap kegiatan pembelajaran.

Kompetensi abad ke 21 menjadi suatu harapan dalam pelaksanaan kurikulum sekolah yang mendukung penggunaan teknologi sehingga dapat mempercepat segala aktivitas yang dikendalikan dengan kecanggihan teknologi yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Kompetensi abad ke 21 yang sejatinya harus dimiliki oleh peserta didik pada era ini memaksa mereka untuk mampu berpikir kritis, komunikasi baik, kreativitas dan kerjasama yang dapat membentuk pola sikap serta pola tindak dengan pembiasaan yang akan membentuk karakter peserta didik. Pembentukan karakter peserta didik dengan basis kompetensi abad ke 21 diharapkan dapat meningkatkan penguatan pembelajaran antara pendidik dan peserta didik sehingga menimbulkan kesadaran untuk adanya perbaikan dalam segala aspek kegiatan pembelajaran, sejatinya kegiatan pembelajaran yang diperlukan bukan hanya sekedar transfer knowledge tapi jauh daripada itu pembentukan karakter peserta didik sangat dibutuhkan di era revolusi industri 4.0 dan di era pandemi untuk mampu survive dalam kehidupan dan karirnya di masa depan.

Peserta didik sangat membutuhkan karakter yang harus tertanam pada setiap individu untuk mampu menghadapi tantangan abad ke 21 yang diungkapkan oleh Maulidah, (2019) dimana masyarakat abad ke 21 memiliki tuntutan harus sukses dalam kehidupan dan karir yang membutuhkan kolaborasi antara kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan yang dimana peserta didik harus dapat menguasai, beradaptasi dan hidup berdampingan dengan teknologi agar kelak menjadi peserta didik yang memiliki keterampilan dan pendayagunaan yang harus dimiliki peserta didik. Peserta didik dengan demikian harus menguasai kompetensi abad ke 21 yang tentunya dibekali dengan karakter baik agar dapat mengikis krisis di bidang karakter.

Adanya kerjasama yang dikembangkan mengenai pendidikan moral pada peserta didik yang bersinergis antara sekolah dan keluarga menjadi salah satu fundamen dasar untuk membentuk karakter peserta didik dengan pola asuh orangtua serta pola pendidikan formal disekolah. Lickona, (2012) mengungkapkan komponen karakter baik dapat kita ketahui yaitu pertama, dari suatu pengetahuan moral, yang terdiri dari: kesadaran moral, pengetahuan nilai moral, penentuan perspektif, pemikiran moral, pengambilan keputusan, dan pengetahuan pribadi. Kedua, perasaan moral, yakni: hati nurai, harga diri, empati, mencintai hal yang baik, kendali diri dan kerendahan hati. Ketiga adalah suatu tindakan moral, yang di dalamnya terdapat: kompetensi, keinginan, dan kebiasaan. Pendapat di atas menegaskan bahwa perlu ditanamkan semenjak dini pembentukan karakter baik di lingkungan sekolah maupun lingkungan keluarga yang tentunya menjadi penyangga utama dalam keberhasilan pembentukan karakter di era pandemi.

Karakter bangsa merupakan sintesis dari perilaku yang memiliki kualitas khas dengan cerminan pada adanya pemahaman diri, kesadaran diri, empati, rasa dan karsa, yang tentunya hasil dari suatu olah rasa, olah hati, olah pikir dan olah raga yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila yang termaktub dalam UUD 1945 dengan prinsip bhineka tunggal ika menuju pada gerakan nasional revolusi mental (Hartono, 2014). Perhatian berfokus pada pembentukan karakter bahwa pentingnya memupuk sikap humanisme untuk mencapai tujuan bangsa dengan memiliki bangsa yang berkarakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Keterampilan serta keteladanan sangat penting dalam mengimplementasikan nilai-nilai karakter dalam kegiatan pembelajaran, sehingga dapat disimpulkan bahwa kehidupan abad ke 21 sejatinya pendidik dan peserta didik selayaknya harus mampu menguasai kompetensi abad ke 21 untuk membentuk karakter peserta didik dan mengembangkan keterampilan peserta didik yang dapat digunakan untuk menghadapi tantangan masa depan.

Simpulan

Pembentukan *civic disposition* sebelum masa pandemi Covid-19 sudah dilakukan dengan pembinaan mental dan pembinaan karakter namun hal tersebut terkendala pada saat adanya perubahan situasi yang tidak bisa lagi dilakukan secara langsung dikarenakan diberlakukannya sistem pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang dilakukan dirumah dengan pembelajaran dalam jaringan (*daring*) karena munculnya pandemi covid-19. Fokus upaya pembentukan *civic disposition* peserta didik pada era pandemi dilakukan sebatas pada proses pembelajaran. Pembentukan karakter peserta didik berbasis kompetensi abad ke 21 dengan inti subjek kompetensi abad ke 21 yaitu: *learning and innovation skills, information, media, and technology skills, life and career skills* dapat mendorong peserta didik untuk mampu bertahan dalam kehidupan dan tantangan abad ke 21. Penyiapan sumber daya manusia dalam konteks peserta didik dengan pembentukan karakter berbasis kompetensi abad ke 21 akan sangat efektif jika dilakukan dalam kegiatan secara tatap muka yang sejatinya pembentukan karakter harus melalui sentuhan hati secara langsung oleh pendidik kepada peserta didik, tetapi dapat dipahami bersama kenyataannya pembentukan karakter peserta didik yang dilaksanakan pada kegiatan pembelajaran *daring* di masa pandemi memberikan bukti nyata bahwa pembentukan karakter peserta didik berbasis kompetensi abad ke 21 hanya dapat diimplementasikan dengan baik melalui proses pembelajaran *daring* dengan pembiasaan yang dilakukan pendidik kepada peserta didik.

Referensi

- Alwasilah, A. C. (2012). *Pokoknya kualitatif*. PT. Dunia Pustaka Jaya.
- Branson, M. S. (1999). *The Role of Civic Education*. CCE.
- Budimansyah, D. (2015). *Reposisi Peran Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Pembangunan Karakter Bangsa*.
- Budiwibowo, S. (2016). Membangun Pendidikan Karakter Generasi Muda Melalui Budaya Kearifan Lokal Di Era Global. *Premiere Educandum: Jurnal Pendidikan Dasar Dan Pembelajaran*, 3(01), 39–49. <https://doi.org/10.25273/pe.v3i01.57>
- Daulay, H. P. (2012). *Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia*. Kencana.
- Dewi, E. K., & Jatningsih, O. (2015). Pengaruh Penggunaan Model Pembelajaran Problem Based Learning terhadap Kemampuan Berpikir Kritis Siswa pada Mata Pelajaran PPKn Kelas X di SMAN 22 Surabaya. *Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, 2(03), 936-950.
- Griffin, P., McGaw, B., & Care, E. (2012). *Assessment and teaching of 21st skills*. Springer Publishing Company.
- Gultom, A. F., Munir, M., & Ariani, I. (2019). Pemikiran Kierkegaard Tentang Manusia Agony dan Proses Penyembuhan Diri. *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, 4(2), 55-61.
- Hartono. (2014). Pendidikan karakter dalam kurikulum. *Jnana Budaya*, 19(2), 259–268.
- Kemendikbud. (2017). Direktorat Pembinaan SMA. Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah: Jakarta.
- Khoirot, P. D. P. P. M., Yudiningrum, F. R., Wijaya, S. H. B., Satyawan, I. A., & Winarni, L. (2019) Literasi Media Sosial di Pondok Pesantren (Aktivitas Literasi Media Sosial mengenai Hoaks, Ujaran Kebencian Perundungan di Pondok Pesantren Miftahul Khoirot Kota Surakarta. retrieved from <http://www.jurnalkommas.com/docs/paper%20jurnal%20IBM%20ponpes%202019.pdf>
- Lickona, T. (2012). *Mendidik Untuk Membentuk Karakter*. Bumi Aksara.
- Mahendra, P. R. A. (2017). Peran Strategis PKN untuk Membangun Karakter Bagi Mahasiswa. *Widya Accarya*, 8(2).
- Martini, E. (2018). Membangun Karakter Generasi Muda Melalui Model Pembelajaran Berbasis Kecakapan Abad 21. *Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 3(2), 21–27.

- <https://doi.org/10.24269/jpk.v3.n2.2018.pp21-27>
- Maulidah, E. (2019). Character Building Dan Keterampilan Abad 21 Dalam Pembelajaran Di Era Revolusi Industri 4.0. *Prosiding Seminar Nasional PGSD, 27 April 2019*, 138–146.
- Mukhadis, A. (2013). Sosok Manusia Indonesia Unggul Dan Berkarakter Dalam Bidang Teknologi Sebagai Tuntutan Hidup Di Era Globalisasi. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 2, 123499. <https://doi.org/10.21831/jpk.v2i2.1434>
- Rahmatiani, L., & Indriyani, D. (2020). Civic disposition : modal dalam era new normal. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Universitas Pamulang 2020*, 1(1), 144–152. Civic Disposition, Era New Normal, Culture shock
- Ramayulis & Samsul Nizar. (2010). *Filsafat Pendidikan Islam: Telaah Sistem Pendidikan dan Pemikiran Para Tokohnya*. Kalam Mulia.
- Sari, D. I., Rejekiingsih, T., & Muchtarom, M. (2019). *The Concept of Human Literacy as Civics Education Strategy to Reinforce Students' Character in the Era of Disruption*. 397(Iclique 2019), 1132–1141. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.200129.140>
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. PT Alfabeta.
- Surani, D. (2019, May). Studi literatur: Peran teknolog pendidikan dalam pendidikan 4.0. In *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan FKIP (Vol. 2, No. 1, pp. 456-469)*.
- Trilling, B., & Fadel, C. (2009). 21st Century Skills_ Learning for Life in Our Times. *Journal of Sustainable Development Education and Research*, 2(1), 243.
- Widiatmaka, P. (2016). Kendala Pendidikan Kewarganegaraan dalam membangun karakter peserta didik di dalam proses pembelajaran. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 13(2), 188–198. <https://doi.org/10.21831/civics.v13i2.12743>

Narrative Policy Framework: The Role of Media Narratives on Alcohol Investment Policy in Indonesia

Dedi Kusuma Habibie ^a, Muhammad Kamil ^b, Danang Kurniawan ^{c,1}, Salahudin^c, Umi Kulsum ^c

^a Universitas Riau, Indonesia, ^bUniversitas Muhammadiyah Malang, Indonesia, ^cUniversitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia

¹kurniawand949@gmail.com*

*korespondensi penulis

Informasi artikel

: ABSTRAK

Received: 2 Agustus 2021;

Revised: 11 November 2021;

Accepted: 8 Desember 2021

Kata-kata kunci:

Narasi Kebijakan;

Kebijakan Publik;

Media Sosial.

Penelitian ini bertujuan mengetahui peran narasi kebijakan publik dalam merumuskan kebijakan investasi alkohol di Indonesia. Narasi publik berfungsi memberikan informasi secara kolektif terkait proses kebijakan dalam rangka merespon dukungan dan tuntutan. Studi ini melakukan studi Narrative Policy Framework terkait kebijakan investasi alkohol di Indonesia. Metode penelitian menggunakan pendekatan Q-DAS (*Qualitative Data Analysis Software*) dengan alat analisis software Nvivo Plus 12. Data penelitian adalah aktivitas media massa nasional dan media sosial Twitter yang ditentukan berdasarkan periode tertentu. Hasil kajian menunjukkan bahwa respon naratif publik terhadap Kebijakan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal mendapat tanggapan yang beragam dari masyarakat dan organisasi masyarakat. Dalam gerakan sosial melalui narasi kebijakan penolakan investasi miras di Indonesia, masyarakat terbagi menjadi kelompok-kelompok besar, antara lain LSM, LSM, dan ormas keagamaan. Penolakan tersebut memiliki substansi naratif terkait dengan nilai-nilai yang menjadi dasar penolakan, diantaranya merusak moral anak bangsa, yaitu pemuda sebagai generasi penerus bangsa, dalam upaya membangun karakter bangsa (*nation and character building*) akibatnya, intensitas kejahatan di masyarakat akan meningkat. Selain itu, penolakan tersebut juga mendapat legitimasi yang kuat dari berbagai aktor yang membuat masyarakat ikut terlibat mendukung gerakan penolakan investasi miras.

ABSTRACT

Keywords:

Narrative Policy;

Public Policy;

Social Media.

This study aims to determine the role of public policy narratives in formulating alcohol investment policies in Indonesia. Public narratives work in concert with the policy process in response to support and inquiries. This study conducted a Narrative Policy Framework study related to alcohol investment policies in Indonesia. The research method uses the Q-DAS (Qualitative Data Analysis Software) approach with the Nvivo Plus 12 software analysis tool. The research data are the activities of the national mass media and Twitter social media which are determined based on a certain period. The results of the study show that public narrative responses to the Presidential Regulation (Perpres) Policy Number 10 of 2021 concerning the Investment Business Sector have received various responses from the community and community organizations. In social movements through the narrative of alcohol investment policies in Indonesia, the community is divided into large groups, including NGOs, NGOs, and religious organizations. The refusal has the substance of the narrative with the values that are the basis of, among others, damaging the morals of the nation's children, namely youth as the nation's next generation, in an effort to build character, as a result, crime in society will increase. it also gets strong legitimacy from various actors who make the community get involved in alcohol interactions.

Copyright © 2021 (Dedi Kusuma Habibie dkk). All Right Reserved

How to Cite : Habibie, D. K., Kamil, M., Kurniawan, D., Salahudin, & Kulsum, U. (2021). Narrative Policy Framework: The Role of Media Narratives on Alcohol Investment Policy in Indonesia: The Role of Media Narratives on Alcohol Investment Policy in Indonesia. *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, 6(2), 64-76. <https://doi.org/10.21067/jmk.v6i2.5824>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Introduction

The media can be understood as a channel for spreading their problems to mobilize groups and citizens in achieving policy success (Bragg & Soler, 2017; M. Weible et al., 2018; Mark K McBeth et al., 2005). The potential of the media as an intermediary for mass communication can be a significant force for social movements so that the existence of narratives in the news media has the potential to strengthen or change public problems around controversial topics that are of concern to the broader community (E. A. Shanahan, Jones, et al., 2011). The process of forming public narratives in policy responses is systematically carried out by policy actors such as Governance, Civil Society, and Politicians who describe policies, issues that can be powerful in shaping public opinion and policy agendas (Ertas, 2015; E. A. Shanahan, Jones, et al., 2011; Yoo, 2019). Narrative in the media can become a discourse in playing a vital role in policy formulation, so identifying narratives in the news media is a challenging task (N. Gupta et al., 2017).

Public narratives can reconstruct the aims and objectives conveyed by actors on policy issues, which are the Government's focus in formulating policies. In democratic countries, especially in Indonesia, the Narrative Policy Framework can play an essential role in public policymaking through participation in the media (Bedsworth et al., 2004). Policy experts use the Narrative Policy Framework (NPF) to systematically study policy group actors' narrative elements and strategies to control government policies (N. Gupta et al., 2017). So that the media can make a collective discussion of substance that has the attention of every group regarding stakeholder communication in environmental policymaking, analyzing stakeholder narrative strategies, effectiveness, and framing the aims and objectives in each narrative strategy used (Rodríguez-Martínez et al., 2019).

Indonesia, in the latter case, has more attention in the policymaking process related to alcohol investment. The alcohol investment policy is stated in Presidential Regulation (Perpres) Number 10 of 2021 concerning the Investment Business Sector. The Government's decision to set the liquor industry as a positive investment list (DPI) starting in 2021 has drawn criticism. The policy is contained in Presidential Regulation (Perpres) Number 10 of 2021 concerning business fields open to investment activities where the Liquor Industry (Liquor) Containing Alcohol and Beverage Industry Containing Alcohol (Wine) are included with conditions. This policy results from a follow-up to the February 2021 State Budget report, in which alcohol is a potential industrial sector that contributes revenue to the state in the form of excise. Excise revenue from Beverages Containing Ethyl Alcohol (MMEA) in January amounted to Rp250 billion. The figure is minus 15.18 percent on an annual basis (CNN, 2021). In Presidential Decree 10/2021, Jokowi regulates liquor investment licensing for four provinces, including Bali, East Nusa Tenggara, North Sulawesi, and Papua.

The policy, within one week, had a negative response from elements of the wider community (NGOs/NGOs). Religious organizations are the ones who are very loud in rejecting the rule. Among them came from PBNU, PP Muhammadiyah to MUI (CNN, 2021). The refusal of these policies collectively becomes a public narrative conveyed through the use of ICT social media and the role of digital mass media. With this refusal, the Government decided to revoke the regulation regarding investment in the liquor industry, as stated in the attachment to Presidential Regulation (Perpres) Number 10 of 2021 concerning the Investment Business Sector after it became a polemic past week (Kompas, 2021).

In this case, religious organizations play their role in teaching spiritual values. In Indonesia, which is predominantly Muslim and adheres to an eastern culture, it is not allowed freedom related to alcoholic beverages. The rejection of various social institutions and religious organizations shows resistance to cultural changes/transitions that will distort moral values in Indonesian society that have been formed so far.

This study looks at the role of social media and mass media in producing public narratives in the policy process. Then the results of the narrative analysis are carried out by constructing the narrative that is delivered so that it aims to develop ideological assumptions

that are contained behind the words in the text or speech in various forms of power (Darma & Shenita, 2009). Then, these results can describe a text (social reality) related to the interests of a person or dominant group who has a specific goal to get what they want (Darma & Shenita, 2009). Thus, this research can answer the development of Information and Communication Technology that can be appropriately utilized in the public policy sector and policy communication, which is a crucial aspect to be one of the attentions of the Government as a policy actor to consider media and social media as a basis for public communication.

Policy narratives become a source of strategically constructed political life. "Stories" contain predictable elements and strategies to influence public opinion towards support for specific policy preferences (Layzer & Goodson, 2006; E. A. Shanahan, Jones, et al., 2011; Stone Jr. et al., 2019). A narrative is a story with a temporal sequence of events (McComas & Shanahan, 1999) that unfolds in a plot (Abell, 2004; Somers, 1992) populated by dramatic moments, symbols, and archetypal characters (Mark K McBeth et al., 2005) that culminates in the moral of the story (Das, 2017). Thus, the Narrative Policy Framework (NPF) role in policy is through policy actors using stories (narratives) to influence the policymaking process. In addition, the essential thing in the policy narrative is to create a structured frame related to the development of a problem definition based on the inclusion of some evidence and not other information to support specific policy outcomes (Entman & Rojecki, 1993; T. Shanahan & Shanahan, 2008).

NPF begins by scientifically exploring the notion that humans use narrative, or stories, as primary, and provides a way to understand themselves and the world around them (Archer et al., 2016; M K McBeth et al., 2014). The idea is that if you can scientifically understand people's stories about public policy, then you can not only explain and explain the policy process, we might as well predict. Policy actors reduce complex policy issues into stories with settings, characters, plots, and morals that help people understand the problem (M D Jones et al., 2014). Through the NPF policy narrative, public actors can provide policy solutions based on several choices of their attitudes (Boucquey et al., 2016; Bragg & Soler, 2017). For example, about some public problems that have great concern for the public, they will highlight some problems and ignore some others (Boucquey et al., 2016; Bragg & Soler, 2017).

Policy experts use the Narrative Policy Framework (NPF) to systematically study the narrative elements and strategies used by policy group actors to advance the agenda (K. P. Gupta et al., 2018). In the policy literature, theoretical work on narratives based on contrasting differences and assumptions, such as individual models, constitutes reality (Husmann, 2015). Using a multi-case study of stakeholder communication in environmental policymaking analyzes stakeholder narratives of strategy, effectiveness, and framing winners and losers (M D Jones & McBeth, 2020). In addition, the NPF also has a strong relationship in the implementation of policymaking research, both of which seek to uncover the complexity of the temporal interactions between public policy and policy actors, events, contexts, and outcomes (García Lozano et al., 2019).

The Narrative Policy Framework (NPF) attempts to describe, explain, and predict the role of narratives in politics and policy (Lin & Chung, 2020). As for the benefits with theoretical tools developed within the NPF, researchers have scientifically described the relationship between individuals, groups, coalitions, and institutions, and culture, with various aspects of public policy (E. A. Shanahan et al., 2018). The policy process framework has two main expositions detailing core assumptions, levels of analysis, hypotheses, and definitions of narrative concepts (Bolívar et al., 2015; Bragg & Soler, 2017). Three levels of analysis are available: micro, meso, and macro (Huda, 2021). In addition, the approach to using content analysis identifies elements of the policy narrative (Michael D. Jones & McBeth, 2010).

Method

This research focuses on seeing how the public narrative responds to alcohol investment policy to influence the policy process (M D Jones & Radaelli, 2015). Researchers use news data and social media Twitter as material for narrative analysis of the response to alcohol investment

policy. We used the primary search term "Alcoholic Investments," "Alcoholic Investment Banks," from January 01, 2021, to March November 2021. The news was reviewed and ensured that the article included an essential section on informational news on Alcoholic Investments. (Blair & McCormack, 2016) Non-news articles (e.g., editorials, comments) are removed and replaced with other randomly selected articles. One of two coders coded the document using a similar codebook (Peterson et al., 2020). The stages of building a research question (NPF), identifying the research locus, the level of analysis distinguished from the unit of analysis, specifying the research model, coding visual narrative data, accessing narrative data, analyzing narrative data (Sioen et al., 2018). The research steps in the NPF tradition described above illustrate a mixed tradition between positivistic and postpositivist (Salahudin et al., 2020). For example, one of the news focuses has a policy-centered narrative by examining the policy process of a policy issue through narrative and strategic elements (M D Jones & Radaelli, 2015).

Discussion and Discussion Results

The Alcohol Investment Policy in Indonesia has received significant attention from every community, NGOs, and NGO through the public narrative messages conveyed. Policy narratives can be formed through public productivity in addressing issues and discussing policy-related issues (Peterson et al., 2020). The public's response to government policies related to alcohol investment has more attention on media and social media. The broader community of Actors uses the Internet and social media platforms such as YouTube, Twitter, Facebook, and Reddit to provide attitudes and narratives related to policy narratives (Veselková, 2017). In the alcohol investment policy in Indonesia, Twitter is one of the platforms used to produce policy narratives against alcohol investment in Indonesia. This condition can be seen from the high productivity of the community through social media Twitter as a public facility in representing public attitudes related to the movement to reject alcohol investment. The problems that are conveyed by the public through narratives in the media must be considered by the Government is looking at systematically and how actors take attitudes related to policies that are being or will be made (Stephany, 2020).

The Twitter social media platform is the basis for public intermediaries in using public narratives as a social movement in rejecting alcohol investment in Indonesia. The tracer results show a narrative that can be visualized from the results of the public response, which can be seen from the movement in the massive use of hashtags. The following is one of the hashtags used by the public who are members of the movement against alcohol investment in Indonesia.

Table 1. The use of hashtags as a symbol of the movement to reject alcohol investment

No.	Hashtags	Descriptions
1	#rezimperrusakmoral Thehashtag	use of theas a whole is a form of public disappointment with the attitude of the Government in establishing the rules for legalization of alcohol; several actors argue through the hashtag which is related to investment policies in the liquor and alcoholic beverage industry it will facilitate the massive circulation of alcohol in various regions. As a result, the intensity of crime in society will increase. Moreover, this alcohol can damage the morality of the nation's children, namely the youth as the nation's next generation.

-
- 2 #batalkanperpresmiras use represents normatively criticizing the regulations of the
Thehashtags presidential regulation, which should not be for the sake of investment. It will damage aspects of the nation's education. In addition, the public thinks that although initially the investment policy in the business sector of the liquor and alcoholic beverage industry was considered to be able to bring income to the state, the negative impacts were far more significant. Foreign exchange may increase, but it must be remembered that the damage to the morality of the Indonesian nation will be permanent and prolonged. The reason is that education is a manifestation and the principal capital in efforts to develop the nation's character (nation and character-building).
-

The use of hashtags can be an effective delivery and become one of the social media movements in giving an attitude of rejection to government policies. The role of public opinion in policy outcomes is understood normatively as “must” or “must” in the policy process (McMorris et al., 2018). Narrative messages conveyed by the public in social media Twitter have various forms of messages conveyed through hashtags created by the public. The hashtag generally represents a form of rejection of the Government's policy of legalizing alcohol investment. The narrative of rejection can be a form of the social movement against government policies (Darmastuti et al., 2016). With the development of rejection through hashtags on February 24, 2021, the trend of conversations on social media continues to rise, with 93k mentions on Twitter and 3.4k on online news. So that this condition illustrates the problems in the alcohol investment policy in Indonesia, policy problems can be identified from the relationship between actors in the policy process in general, besides that the core of the policy narrative is a discussion in substance-related to policy issues and problems (Petridou & Mintrom, 2020).

The emergence of the hashtags #rezimperrusakmoral and #batalkanperpresmiras is a form of disappointment and opposition from the public, especially Twitter users, to the government. Because people think that the government is more concerned with the value of an investment and financial benefits that the state will receive, but ignores and forgets that this results in the degradation of people's values and morals. The adverse effects of social life, the erosion of religious, moral values, and eastern culture are pawned for the state's benefits from investing in alcohol in Indonesia.

People assume that moral values and eastern culture which do not liberate people from drinking alcohol must be maintained. Because if alcohol investment in Indonesia has been used as a positive investment, this is a step taken by the government and is considered a wrong step by the community. Because these policy steps are viewed as a form of slowly destroying the nation's morale. Because the policy is implemented, it will erode the moral values of the community. It will change the cultural pattern in which alcohol has been used in Indonesia as a drink that must be avoided for consumption and is considered a taboo/adverse action when drinking it. It will turn into a natural and normal act to drink alcohol.

The problem with this policy is that there is a massive rejection of social media Twitter through broadcast messages using hashtags that have become symbols of the social movement to reject alcohol investment, including #rezimperrusakmoral, #batalkanperpresmiras, and #tolakinvestasimiras. Hashtag messages are conveyed by individual community social media accounts, NGO media accounts, NGOs, and Community Organizations using trending hashtag mentions. Based on the hashtag used in rejecting investment policies, it can be seen that the cluster group is viewing the rejection relationship on social media Twitter



Figure 1. Public narrative relations

Content analysis shows that the use of narratives related to alcohol investment policy problems is influenced by several problems that arise, including religious and social factors of the community. In addition, the results of the visualization of narrative relations show the participation of community organizations and the public in general in producing policy narratives. In this case, the role of community organizations can provide legitimacy to the public, which can create a greater power of social movement capital. As for the policy narrative, the rejection of alcohol investment is also carried out by the official social media accounts of community organizations, including Muhammadiyah, Nahdatul Ulama, and the Indonesian Ulema Council. The narrative results of the social movement rejecting alcohol investment in Indonesia show a high collectivity related to the rejection of government policies. The policy actor makes the rejection based on the objective aspect of influencing policy refusal. Based on the results of the narrative visualization, it shows the primary reasons for rejecting the policy, based on the very pragmatic alcohol investment policy and contrary to religion.

Problems in policy are often accompanied by policy solutions (E. A. Shanahan, Mcbeth, et al., 2011). In this case, the Government pays more attention to the response of the community's rejection. The visualization results also show a solution or the Government's attitude in responding to public narratives. The solution given by the public in responding to government policies is the revocation of these policies, which are considered to hurt the community. Thus, the analysis of narrative relations can show the substance of policy problems that are of public concern.

Policy narratives begin by articulating five basic assumptions, that people are rationally bound, that the world of policy is socially constructed, that the socially constructed world is relative (that is, constrained by what people initially believe), that narratives are separable objects. Into a quantifiable part, humans prefer to communicate and think in narrative form (E. A. Shanahan, Mcbeth, et al., 2011). The mass media can be one of the places in creating high public attention related to public policy issues. The role of the media, in particular, in generating policy narratives is sufficiently mainstreamed by the nature of the role of the media in policy systems (Dyckman, 2019; Menahem & Gilad, 2016; Roengtam et al., 2017). The researcher analyzed several national mass media that have paid more attention to the development of the issue of alcohol investment. Based on the search results related to Indonesia's alcohol investment policy process, the researcher found 30 news stories that focus on discussions related to alcohol investment in Indonesia.

Table 2. National Media Classification

Media	Time	Total
Detik	27/02/2021-04/03/2021	15
Kompas	16/02/2021-03/03/2021	12
CNN Indonesia	02/03/2021-03/03/2021	16

The researcher uses three national media sources of information on public narratives built on the media. Based on the rejection narrative tracer results published in the three national media, Detik, Kompas, and CNNIndonesia, there were 42 news stories. Based on the results of narrative analysis from three Indonesian national media with different characteristics from each actor. Policy narratives conveyed by actors in mass media can become content issues in maintaining the substance of certain narratives that will reflect the communication strategies they use to change specific policies or support them (Witting & Dudley, 2019). Policy narrative structures can argue that most policy narratives contain identifiable elements, such as setting, characters, plot, and morals (Menahem & Gilad, 2016). However, the existence of these elements can vary substantially, depending on the policy issues addressed by the narrative, the actors who construct the narrative, and the media used to communicate the story.

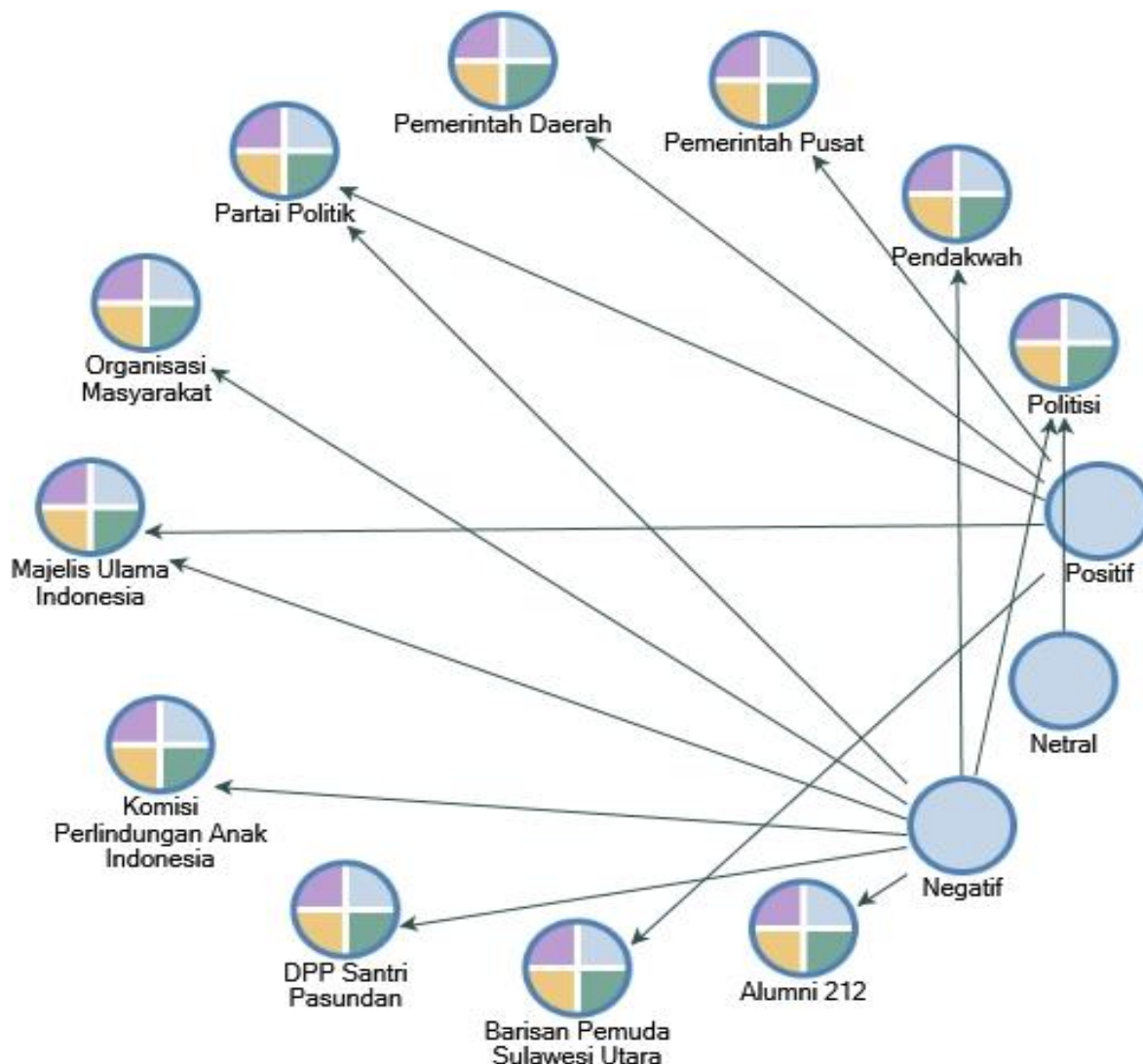


Figure 2. The sentiment of actors based on policy narrative

The analysis results on media narratives related to Alcohol Investment in Indonesia have three narrative response sentiments related to policies, including positive, negative, and neutral. Policy narratives conveyed by actors and groups, who believe that they are in a policy battle, will carry out narrative strategies to increase the number of people involved in the policy narrative battle, in addition to these narratives that believe a policy or problem harms a large number of people. In contrast, relatively few people benefit (Witting & Dudley, 2019). A pattern shows that public policy narrative sentiment is divided into positive and negative related to alcohol investment policy. Dominantly policy actors have negative sentiments related to alcohol investment policies, while a small number of policy actors have positive attitudes related to alcohol investment.

The group of actors who provide the policy narrative participates as individuals or groups, forming coalitions that compete to obtain favorable policy outcomes by spreading the narrative (Blair & McCormack, 2016). Negative sentiment towards the alcohol investment policy is carried out by some public actors, including community organizations (Nahdatul Ulama, Muhammadiyah, Indonesian Ulema Council, and Political Parties). The actor has a firm attitude in questioning the alcohol investment policy in Indonesia. Attitudes in the form of policy narratives can serve as expanding or contracting the scope of the conflict to control other actors' involvement in the policy subsystem to support their position (Micheline et al., 2017). So that group narrative messages conveyed through mass media can become social advocacy and as a common strategy used in narrative elements when communicating with the public (Pierce et al., 2014).

Political party groups are also one of the main actors in the production of narratives in the media. In the narrative of investment policy in the mass media, the attitude of political parties, which represents the institutional structure and politicians of political parties, functions as seemingly universal organizations. In addition, the role of political parties cannot be separated from the function of political communication and representing the aspirations of the people so that they act as part of the tool for individuals to sharpen some aspects of reality while leveling others (van der Voet, 2021). An in-depth analysis of policy narratives conveyed by political parties in the mass media systematically shows the division of sentiment. Then the researcher looked systematically at the policy narratives conveyed by political parties and politicians in various media, where the results of the systematic structure analysis in the policy narratives in the mass media showed that the narrative was divided into two positive and negative parts in addressing the issue of alcohol investment in Indonesia.

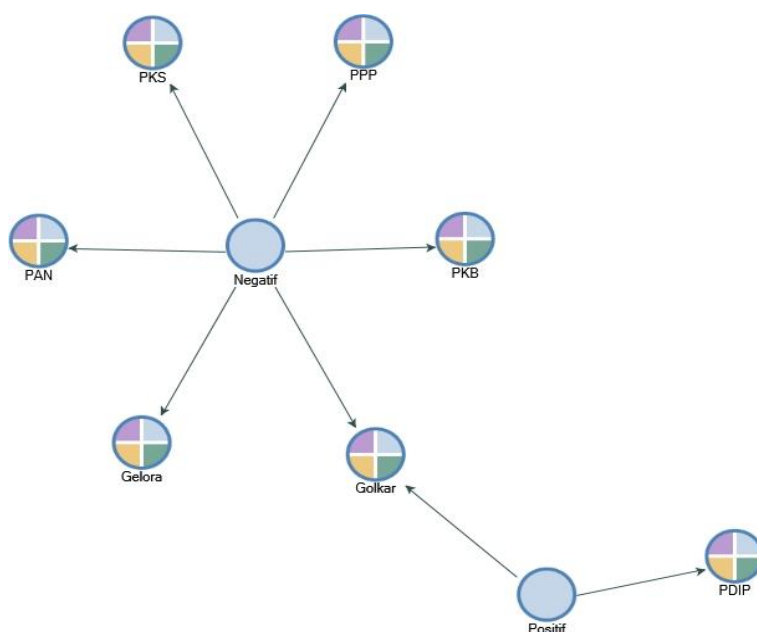


Figure 3. The sentiment of Political Parties

shaping social movements digitally through social media and Information and Communication Technology (ICT). The rapid and effective development of narratives directly creates a process of great public attention so that the digital social movements carried out have great power. For example, in social movements through the policy narrative of refusing alcohol investment in Indonesia, the community is divided into large groups, including NGOs, NGOs, and religious community organizations. Because the policy is implemented, it will erode the moral values of the community. It will change the cultural pattern in which alcohol has been used in Indonesia as a drink that must be avoided for consumption and is considered a taboo/adverse action when drinking it. It will turn into a natural and normal act to drink alcohol. The refusal has a narrative substance related to the values that are the basis for the rejection. Besides that, the rejection also gets strong legitimacy from various actors who make the community get involved in supporting the movement to reject alcohol investment. The narrative policy framework strategy in the case of rejection of alcohol investment in Indonesia has had success, as evidenced by the repeal of the Presidential Regulation regarding alcohol investment. So it is clear that social media and media today can be part of the process of making public policies and the function of effective control strategies related to government policies.

Reference

- Abell, P. (2004). Narrative explanation: an alternative to variable-centered explanation? *Annu. Rev. Sociol.*, 30, 287–310.
- Archer, D., Colenbrander, S., & Dodman, D. (2016). Responding to climate change in Asian cities: Governance for a more resilient urban future. In *Responding to Climate Change in Asian Cities: Governance for a More Resilient Urban Future*. Taylor and Francis.
<https://doi.org/10.4324/9781315620701>
- Bedsworth, L. W., Lowenthal, M. D., & Kastenber, W. E. (2004). Uncertainty and regulation: The rhetoric of risk in the California low-level radioactive waste debate. *Science, Technology, & Human Values*, 29(3), 406–427.
- Blair, B. D., & McCormack, L. (2016). Applying the narrative policy framework to the issues surrounding hydraulic fracturing within the news media: A research note. *Research and Politics*, 3(1). <https://doi.org/10.1177/2053168016628334>
- Bolívar, M. P. R., Muñoz, L. A., & López Hernández, A. M. (2015). Research and experiences in implementing E-government endeavors in emerging countries: A literature review. In *Digital Solutions for Contemporary Democracy and Government* (pp. 328–346). IGI Global.
<https://doi.org/10.4018/978-1-4666-8430-0.ch017>
- Boucquey, N., Fairbanks, L., St. Martin, K., Campbell, L. M., & McCay, B. (2016). The ontological politics of marine spatial planning: Assembling the ocean and shaping the capacities of ‘Community’ and ‘Environment.’ *Geoforum*, 75, 1–11.
<https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2016.06.014>
- Bragg, D. D., & Soler, M. C. (2017). Policy narratives on applied baccalaureate degrees: implications for student access to and progression through college in the United States. *Journal of Vocational Education and Training*, 69(1), 123–146.
<https://doi.org/10.1080/13636820.2017.1289550>
- Darma, J. S., & Shenita, A. (2009). *Buku Pintar Multimedia*. Mediakita.
- Darmastuti, R., Bajari, A., Martodirdjo, H. S., & Maryani, E. (2016). Samin women’s resistance movement against cement factory construction: A case of Sukolilo in Indonesia. *Man in India*, 96(12), 4903–4918. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85009250624&partnerID=40&md5=fd9fe2aeb499a27fa486942doe4ed880>
- Das, D. K. (2017). Exploring the politico-cultural dimensions for development of smart cities in India. *International Review for Spatial Planning and Sustainable Development*, 5(3), 79–99.
https://doi.org/10.14246/irspsd.5.3_79

- Dyckman, C. (2019). Planners' presence in planning for water quality and availability. In *Transportation, Land Use, and Environmental Planning* (pp. 333–395). Elsevier. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-815167-9.00017-7>
- Entman, R. M., & Rojecki, A. (1993). *Freezing out the public: Elite and media framing of the US anti-nuclear movement*.
- Ertas, N. (2015). Policy Narratives and Public Opinion concerning Charter Schools. *Politics and Policy*, 43(3), 426–451. <https://doi.org/10.1111/polp.12120>
- García Lozano, A., Smith, H., & Basurto, X. (2019). Weaving governance narratives: discourses of climate change, cooperatives, and small-scale fisheries in Mexico. *Maritime Studies*, 18(1), 77–89. <https://doi.org/10.1007/s40152-018-0125-5>
- Gupta, K. P., Singh, S., & Bhaskar, P. (2018). Citizens' perceptions on benefits of e-governance services. *International Journal of Electronic Governance*, 10(1), 24–55. <https://doi.org/10.1504/IJEG.2018.091261>
- Gupta, N., Pandey, P., & Hussain, J. (2017). Effect of physicochemical and biological parameters on the quality of river water of Narmada, Madhya Pradesh, India. *Water Science*, 31(1), 11–23.
- Huda, J. (2021). Sources of Evidence for Risks and Benefits in Agricultural Biotechnology Policy in India: Exploring Links to Setting and Plot in Policy Narratives. *Politics and Policy*, 49(1), 205–247. <https://doi.org/10.1111/polp.12391>
- Husmann, M. A. (2015). Social constructions of obesity target population: an empirical look at obesity policy narratives. *Policy Sciences*, 48(4), 415–442. <https://doi.org/10.1007/s11077-015-9229-6>
- Jones, M D, & McBeth, M. K. (2020). Narrative in the Time of Trump: Is the Narrative Policy Framework good enough to be relevant? *Administrative Theory and Praxis*, 42(2), 91–110. <https://doi.org/10.1080/10841806.2020.1750211>
- Jones, M D, McBeth, M. K., & Shanahan, E. A. (2014). Introducing the narrative policy framework. *The Science of Stories: Applications of the Narrative Policy Framework in Public Policy Analysis*, 1–25. <https://doi.org/10.1057/9781137485861>
- Jones, M D, & Radaelli, C. M. (2015). The Narrative Policy Framework: child or monster? *Critical Policy Studies*, 9(3), 339–355. <https://doi.org/10.1080/19460171.2015.1053959>
- Jones, Michael D., & McBeth, M. K. (2010). A narrative policy framework: Clear enough to be wrong? *Policy Studies Journal*. <https://doi.org/10.1111/j.1541-0072.2010.00364.x>
- Layzer, J. I., & Goodson, B. D. (2006). The “quality” of early care and education settings: Definitional and measurement issues. *Evaluation Review*, 30(5), 556–576.
- Lin, Y.-R., & Chung, W.-T. (2020). The dynamics of Twitter users' gun narratives across major mass shooting events. *Humanities and Social Sciences Communications*, 7(1). <https://doi.org/10.1057/s41599-020-00533-8>
- M. Weible, C., Sabatier, P. A., Shanahan, E. A., Jones, M. D., Mcbeth, M. K., & Radaelli, C. M. (2018). The Narrative Policy Framework. In *Theories of the Policy Process*. <https://doi.org/10.4324/9780429494284-6>
- McBeth, M K, Lybecker, D. L., & Husmann, M. A. (2014). The narrative policy framework and the practitioner: Communicating recycling policy. In *The Science of Stories: Applications of the Narrative Policy Framework in Public Policy Analysis* (pp. 45–68). Palgrave Macmillan. <https://doi.org/10.1057/9781137485861>
- McBeth, Mark K, Shanahan, E. A., & Jones, M. D. (2005). The science of storytelling: Measuring policy beliefs in Greater Yellowstone. *Society and Natural Resources*, 18(5), 413–429.
- McMorris, C., Zanooco, C., & Jones, M. (2018). Policy Narratives and Policy Outcomes: An NPF Examination of Oregon's Ballot Measure 97. *Policy Studies Journal*, 46(4), 771–797. <https://doi.org/10.1111/psj.12263>
- Menahem, G., & Gilad, S. (2016). Policy Stalemate and Policy Change in Israel's Water Sector 1970–2010: Advocacy Coalitions and Policy Narratives. *Review of Policy Research*, 33(3), 316–337. <https://doi.org/10.1111/ropr.12172>

- Michellini, J. J., Del Valle, R. M. G., & Aragón, L. D. A. (2017). Social mobilization and alternative food question in urban areas: Agroecological consumer groups in madrid . *Ciudad y Territorio Estudios Territoriales*, 49(194), 679–698.
<https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85051808723&partnerID=40&md5=a1528d6e311c797b3a006b33960dd592>
- Peterson, H. L., McBeth, M. K., & Jones, M. D. (2020). Policy Process Theory for Rural Studies: Navigating Context and Generalization in Rural Policy. *Politics and Policy*, 48(4), 576–617.
<https://doi.org/10.1111/polp.12366>
- Petridou, E., & Mintrom, M. (2020). A Research Agenda for the Study of Policy Entrepreneurs. *Policy Studies Journal*. <https://doi.org/10.1111/psj.12405>
- Pierce, J. J., Smith-Walter, A., & Peterson, H. L. (2014). Research design and the narrative policy framework. In *The Science of Stories: Applications of the Narrative Policy Framework in Public Policy Analysis* (pp. 27–44). Palgrave Macmillan.
<https://doi.org/10.1057/9781137485861>
- Rodríguez-Martínez, C. C., García-Sánchez, I. M., Vicente-Galindo, P., & Galindo-Villardón, P. (2019). Exploring relationships between environmental performance, E-Government and corruption: A multivariate perspective. *Sustainability (Switzerland)*, 11(22).
<https://doi.org/10.3390/su11226497>
- Roengtam, S., Nurmandi, A., Almarez, D. N., & Kholid, A. (2017). Does social media transform city government? A case study of three ASEAN cities: Bandung, Indonesia, Iligan, Philippines and Pukhet, Thailand. *Transforming Government: People, Process and Policy*, 11(3), 343–376. <https://doi.org/10.1108/TG-10-2016-0071>
- Salahudin, Nurmandi, A., Qodir, Z., Jubba, H., & Mutiarin, D. (2020). Elite capture of budget corruption in three Indonesian regions . *Public Policy and Administration*, 19(2), 340–353.
<https://doi.org/10.13165/VPA-20-19-2-14>
- Shanahan, E. A., Jones, M. D., & McBeth, M. K. (2011). Policy narratives and policy processes. *Policy Studies Journal*, 39(3), 535–561.
- Shanahan, E. A., Jones, M. D., & McBeth, M. K. (2018). How to conduct a Narrative Policy Framework study. *Social Science Journal*, 55(3), 332–345.
<https://doi.org/10.1016/j.soscij.2017.12.002>
- Shanahan, E. A., Mcbeth, M. K., & Hathaway, P. L. (2011). Narrative policy framework: The influence of media policy narratives on public opinion. *Politics and Policy*.
<https://doi.org/10.1111/j.1747-1346.2011.00295.x>
- Shanahan, T., & Shanahan, C. (2008). Teaching disciplinary literacy to adolescents: Rethinking content-area literacy. *Harvard Educational Review*, 78(1), 40–59.
- Sioen, G. B., Terada, T., Sekiyama, M., & Yokohari, M. (2018). Resilience with mixed agricultural and urban land uses in Tokyo, Japan. *Sustainability (Switzerland)*, 10(2).
<https://doi.org/10.3390/su10020435>
- Somers, M. R. (1992). Narrativity, narrative identity, and social action: Rethinking English working-class formation. *Social Science History*, 16(4), 591–630.
- Stephany, F. (2020). It's not only size that matters: Determinants of Estonia's E-governance success. *Electronic Government*, 16(3), 304–313. <https://doi.org/10.1504/EG.2020.108501>
- Stone Jr., B., Lanza, K., Mallen, E., Vargo, J., & Russell, A. (2019). Urban Heat Management in Louisville, Kentucky: A Framework for Climate Adaptation Planning. *Journal of Planning Education and Research*. <https://doi.org/10.1177/0739456X19879214>
- van der Voet, J. (2021). Policy preferences in response to negative economic prospects of COVID-19: A survey-experiment among local politicians in four European countries. *Public Administration*. <https://doi.org/10.1111/padm.12729>
- Veselková, M. (2017). Narrative Policy Framework: Narratives as heuristics in the policy process. *Human Affairs*, 27(2), 178–191. <https://doi.org/10.1515/humaff-2017-0016>
- Witting, A., & Dudley, G. (2019). Narrative strategies in the policy process: social and cognitive foundations. *Journal of Risk Research*, 22(9), 1143–1155.

<https://doi.org/10.1080/13669877.2019.1588915>

Yoo, J. (2019). A year of writing 'dangerously': a narrative of hope. *New Writing*, 16(3), 353-362.

Implementasi Nilai Karakter Religius dalam Tradisi Bersih Desa

Dadang Sundawa^{a, 1*}, Ludovikus Bomans Wadu^{b, 2*}

^{ab} Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia

¹bludovikus@gmail.com*

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 10 November 2021;

Revised: 20 Desember 2021;

Accepted: 31 Desember 2021

Kata-kata kunci:

Bersih Desa;

Budaya Bangsa;

Karakter Religius;

Nilai Karakter.

ABSTRAK

Penelitian ini memberikan gambaran pelaksanaan tradisi bersih desa di Kota Batu Jawa Timur yang mempunyai kandungan nilai-nilai karakter dalam budaya bangsa khususnya karakter religius. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus, teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi kemudian data dianalisis menggunakan reduksi, display dan verifikasi data. Untuk mengecek keabsahan data penelitian ini menggunakan triangulasi data. Hasil dari penelitian ini adalah implementasi nilai karakter budaya bangsa dalam tradisi bersih desa khususnya nilai karakter religius sebagai berikut; (1) sebagai bentuk ungkapan rasa syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa atas karunia yang telah diberikannya kepada warga desa pada umumnya, (2) Sebagai ungkapan rasa terima kasih kepada leluhur desa yang telah “babad alas” atau bedah krawang di desa tersebut, sehingga mereka semua saat ini bisa menempati dan berkehidupan di desa tersebut, (3) Sebagai perwujudan kepercayaan atas adanya kekuatan alam yang tidak kasatmata yang melindungi desa tersebut seisinya yang diyakini dan disimbolkan sebagai pundhen, (4) Sebagai bentuk keinginan dan harapan untuk menolak segala bala’ atau sengkolo seperti penyakit, mara bahaya, prahara, tragedi. (5) Sebagai bentuk upaya nguri-uri budaya warisan nenek moyang yang penuh nilai kearifan local, (6) Sebagai bentuk ungkapan rasa sukacita dan kegembiraan warga masyarakat atas segala yang telah diperolehnya dalam satu tahun yang telah berjalan (hasil pertanian, perdagangan, keterampilan).

ABSTRACT

This study provides an overview of the implementation of the village clean tradition in Batu City, East Java, which contains character values in the nation's culture, especially religious characters. This research uses an approach with the type of case study research, collecting data using observation, interviews and documentation, then data analysis using data reduction, display and leveraging. To check the validity of this research data using data triangulation. The results of this study are the implementation of the values of the nation's cultural character in the clean village tradition, especially the values of religious characters as follows; (1) as an expression of gratitude to God Almighty for the gifts he has given to villagers in general, (2) as an expression of gratitude to the village ancestors who have "babad alas" or krawang surgery in the village, so that all times this can and live in the village, (3) as an embodiment of belief in the existence of natural forces that do not protect the village, the contents of which are believed and symbolized as pundhen, (4) a form of desire and hope to reject all calamities or collusion such as disease, mara danger, tempest, tragedy. (5) As a form of effort to explore the culture of the ancestors of the ancestors who have the value of local wisdom, (6) As a form of expression of gratitude and joy of the citizens for everything that has been obtained in one year that has been running (results, trade, skills).

Keywords:

Bersih Desa;

National culture;

Religious Character;

Character value.

Copyright © 2021 (Dadang Sundawa & Ludovikus Bomans Wadu). All Right Reserved

How to Cite : Sundawa, D., & Wadu, L. B. (2021). Implementasi Nilai Karakter Religius dalam Tradisi Bersih Desa. *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, 6(2), 77-82. <https://doi.org/10.21067/jmk.v6i2.6488>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Bersih desa adalah salah satu produk dari tradisi budaya bangsa Indonesia. Bersih desa merupakan tradisi yang banyak dilakukan dikalangan masyarakat Jawa yang identik dengan syukur atas anugerah rejeki yang didapatkan oleh masyarakat baik itu hasil panen, kesehatan, kesuburan, maupun berbagai hal lainnya (Endraswara, 2006). Pendapat lain dari bersih desa adalah tradisi yang dilaksanakan oleh masyarakat Jawa pada umumnya yang masih diyakini sebagai upacara yang dilakukan untuk tolak balak (Thohir, 2013). Bersih desa biasanya dilakukan dengan rangkaian kegiatan seperti selamatan dan sesajen. Selain itu, tradisi bersih desa dilaksanakan juga pertunjukkan serta permainan tradisional yang menurut masyarakat memiliki kepercayaan magis bagi desa untuk keberkahan hidup bersama di desa tersebut (Fasah, 2018).

Penelitian dan artikel yang mengkaji dan membahas tentang bersih desa telah banyak dilakukan yang memberikan gambaran tentang kandungan nilai dan norma dari pelaksanaan bersih desa. Seperti peran perempuan dalam tradisi upacara bersih desa di Desa Kiringan sebagai penyedia atau pembuat uborampe dan sebagai tledhek atau penari dalam kesenian yang memberikan gambaran bahwa pelaksanaan bersih desa tidak hanya dilakukan oleh laki laki tetapi juga dilaksanakan oleh perempuan walaupun tidak berperan sebagai aktor utama (Setyowati & Hanif, 2014). Hasil penelitian lain menunjukkan bahwa dengan dilaksanakannya bersih desa terdapat tindakan-tindakan warga yang mencirikan pengutamakan persatuan dan kesatuan untuk kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi, mempunyai rasa bangga berbangsa dan bertanah air Indonesia, serta mencirikan wujud persatuan dengan melakukan kegiatan gotong-royong selama pelaksanaan tradisi tersebut dilangsungkan (Ningrum & Muthali'in, 2018). Selain itu, pelaksanaan bersih desa juga memberikan gambaran pelestarian budaya tradisional dari kesenian di Desa Salamrejo khususnya kesenian raksasa yang dalam kesenian ini secara garis besar berisi tentang kegiatan dan norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan kepercayaan yang dapat melindungi desa dari segala musibah (Fitriana, 2017).

Berbagai penelitian sebelumnya tentang pelaksanaan bersih desa yang memperkuat tradisi budaya bangsa yang ada di Indonesia, terdapat juga budaya bangsa yang luntur ditelan zaman. Lunturnya berbagai produk budaya lokal menjadi tantangan tersendiri di era modern saat ini. Seperti permainan tradisional yang luntur bagi anak-anak (Syafii, 2013). Lunturnya folklore masyarakat di desa (Manggala, 2019). Budaya sesajen yang dianggap oleh sebagian pemeluk agama tertentu sebagai budaya yang tidak sesuai dengan ajaran agamanya (Adam dkk, 2019). Pesatnya perkembangan budaya asing yang didukung oleh platform media yang mengakibatkan konsumsi budaya asing meningkat (Nisrina, dkk). Beberapa hasil penelitian ini merupakan sebagian kecil gambaran dari lunturnya budaya bangsa saat ini yang telah diterbitkan dalam berbagai jurnal penelitian.

Budaya dan tradisi bangsa harus terus dilestarikan karena terdapat berbagai nilai, norma dan karakter yang menjadi jatidiri dari bangsa Indonesia (Gloriani, 2013). Salah satu wujud nilai dari karakter yang muncul dari berbagai kegiatan budaya adalah nilai kesukarelaan, hal inilah menjadi ciri khas dari berbagai kegiatan budaya dan menjadi bagian dari masyarakat Indonesia (Adha, 2019). Banyak nilai yang terdapat dalam budaya bangsa Indonesia, namun keberadaan dan keragaman nilai-nilai budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia belum optimal dalam upaya pembangunan karakter bangsa (Yunus, 2013). Upaya mengingat pentingnya pengkajian lebih lanjut untuk menggali nilai-nilai yang ada dalam tradisi dan budaya bangsa maka dibutuhkan penelitian penelitian lanjutan untuk mendukung dan memperkuat pelestarian budaya bangsa. Oleh karena itu, artikel ini akan mengkaji nilai nilai yang terdapat dalam tradisi bersih desa

khususnya pada nilai religius dari budaya bangsa yang terdapat dalam tradisi bersih desa yang dilaksanakan pada masyarakat Kota Batu khususnya di Kelurahan Dadaprejo. Hal ini sebagai salah satu upaya penelusuran nilai-nilai budaya bangsa yang harus dikembangkan untuk mendukung dan membangun karakter budaya bangsa.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus yang dilakukan dilakukan pada Kelurahan Dadaprejo di Kota Batu untuk mengkaji implementasi dari nilai religius dalam pelaksanaan tradisi bersih desa. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan reduksi, display dan verifikasi data. Keabsahan data menggunakan triangulasi data.

Hasil dan Pembahasan

Kota Batu sebagai salah satu destinasi wisata domestik dan mancanegara, memang harus senantiasa melakukan inovasi dalam rangka meningkatkan kunjungan wisatawan. Selama ini kita mengenal destinasi wisata bertopang pada objek yang bersifat artifisial. Sudah saatnya memperluas khazanah destinasi dengan menggali kembali nilai-nilai budaya yang berakar dalam kehidupan masyarakat Batu (kearifan lokal) yang tidak kurang menariknya jika dijadikan sebagai objek kunjungan wisata. Seperti kita ketahui bahwa Kota Batu yang dikenal sekarang sebenarnya memiliki akar dan nilai-nilai budaya klasik dengan ditemukannya Candi Songgoriti dengan sumber air belerang yang sekarang menjadi salah satu destinasi wisatawan. Dengan adanya peninggalan sejarah dan kekayaan budaya lainnya yang dimiliki kota Batu, diharapkan menjadi salah satu upaya memperluas objek kepariwisataan.

Pemerintah Kota Batu mencanangkan visinya “Desa Berbudaya Kota Berjaya Terwujudnya Kota Batu Sebagai Sentra Agro Wisata Internasional Yang berkarakter, Berdaya Saing Dan Sejahtera” dengan misinya yaitu pertama, meningkatkan kualitas kehidupan sosial masyarakat yang berdasarkan nilai-nilai keagamaan dan kearifan budaya lokal. Kedua, meningkatkan pembangunan kualitas dan kesejahteraan sumber daya manusia. Ketiga, mewujudkan daya saing perekonomian daerah yang progresif, mandiri berbasis agrowisata. Keempat, meningkatkan pembangunan infrastruktur dan kawasan pedesaan yang berkualitas dan berwawasan lingkungan. Kelima, meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel berorientasi pada pelayanan publik yang profesional.

Salah satu tradisi yang selalu dilaksanakan secara rutin di kota Batu adalah tradisi bersih desa. Pelaksanaan bersih desa di kota batu dilaksanakan setiap tahunnya dan menjadi rutinitas di setiap kelurahan maupun desa di wilayah pemerintahan kota Batu. Kegiatan Bersih Desa di kota Batu dilaksanakan secara mandiri oleh warga dengan kesukarelaan untuk mendukung terlaksananya kegiatan ini. Kegiatan bersih desa dilaksanakan dengan berbagai kegiatan

Kegiatan bersih desa di kota Batu mempunyai makna membersihkan desa dari berbagai hal yang jahat dalam hal ini penyakit, musibah, wabah dan hal lainnya yang mengganggu keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari hari. Dalam rangkaian kegiatan bersih desa, terdapat tradisi memberikan sesaji kepada danyang desa yang dianggap oleh masyarakat sebagai para leluhur yang membuka desa pertama kali dan juga para leluhur yang telah meninggal dunia. Warga masyarakat meyakini bahwa dengan memberikan sesaji kepada para danyang merupakan ucapan terima kasih atas segala upaya yang telah mereka lakukan terdahulu untuk berdirinya desa tersebut dan juga berterima kasih telah menjauhkan mereka dari berbagai hal yang jahat, seperti musibah, wabah bencana alam dan berbagai hal

lainnya. Selain memberikan sesaji kepada *danyang* desa, warga masyarakat juga berdoa untuk kelancaran kegiatan bersih desa dan juga mengucapkan syukur atas berkat dan rahmat yang didapatkan selama satu tahun terakhir.

Dalam pelaksanaan tradisi bersih desa, salah satu nilai yang paling nampak adalah nilai religius. Nilai religius adalah nilai yang muncul dari sebuah penghayatan, keyakinan dan melaksanakan ajaran agama dan kepercayaan yang dianut (Sholikhati & Rufaidah (2020). Selain itu, ada pendapat lain yang mengatakan nilai religius adalah konsep yang bersumber dari agama dan kepercayaan yang mempengaruhi para penganutnya, mempunyai sifat yang hakiki yang datang dari Tuhan dan kebenarannya diakui oleh para penganutnya (Rifa'I, 2016).

Nilai-nilai religius dari tradisi bersih desa ini didapatkan dalam tujuan dari penyelenggaraan bersih desa yang menurut narasumber terdapat beberapa wujud antara lain: pertama, sebagai bentuk ungkapan rasa syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa atas karunia yang telah diberikannya kepada warga desa pada umumnya. Ungkapan syukur warga desa menjadi bentuk perayaan yang secara eksplisit terwujud saat panen. Panen yang dimaksud pada tradisi bersih desa kerap juga dimaknai sebagai selamat. Peristiwa panen baik itu panen padi dan panen dari hasil tumbuh-tumbuhan yang ditanam oleh warga desa dimengerti secara bahwa Sang Pencipta turut serta memberi berkah atau anugerah yang tampak nyata dalam bentuk hasil yang bisa dijadikan bahan pangan. Bersih desa, dalam konteks ini bisa diletakkan dalam pemaknaan bahwa alam agraris membentuk pola karakter bagi warga untuk menemukan bahwa hasil alam juga merupakan pemberian dari kuasa transendental yang merawat alam beserta para warga sebagai penghuni alam. Tradisi bersih desa, dengan demikian, memiliki kedekatan dengan alam yang membentuk pola pikir kosmologi warga desa (Gultom, 2014).

Nilai religius kedua dari tradisi bersih desa yaitu sebagai ungkapan rasa terima kasih kepada leluhur desa yang telah “babad alas” atau bedah krawang di desa tersebut, sehingga mereka semua saat ini bisa menempati dan berkehidupan di desa tersebut, oleh karena itu mereka (warga desa) perlu mendoakan para leluhur tersebut agar di alamnya saat ini (di akherat) memperoleh suatu bentuk kehidupan “sesudah-hidup” yang setimpal atas jasanya di dunia. Dalam konteks ini, para pendiri desa atau babad alas bukanlah menjadi eksistensi tertinggi yang mesti dikultuskan setara dengan Sang Pencipta. Maka, para pendiri desa diposisikan dalam rangka untuk berterima kasih, karena mereka telah membuka desa, membuka lahan pertanian, yang kemudian bisa dinikmati oleh warga desa. Dari hasil wawancara dengan Pak Sanari, seorang *danyang* desa, terungkap demikian, “ada ucapan syukur karena ada yang telah merintis desa dari hutan sebelumnya.” Hasil wawancara selanjutnya terungkap demikian, “pendiri desa paling awal”, demikian menurut Pak Sanari, “dikenal dengan nama Mbah Prono Yudho”. Untuk itu, bagi pendiri desa, dilakukan *nyadran* (selamatan dan kirim doa) di makam leluhur yang dikeramatkan yaitu Mbah Prono Yudho yang makamnya ada di tengah pemakaman umum desa Dadaprejo.

Nilai religius ketiga, sebagai perwujudan kepercayaan atas adanya kekuatan alam yang tidak kasatmata yang melindungi desa tersebut seisinya yang diyakini dan disimbolkan sebagai *pundhen*, untuk itu warga desa perlu sungguh sesaji dan kirim “donga” yang *diujubkan* di *pundhen* tersebut. Nilai religius keempat, sebagai bentuk keinginan dan harapan untuk menolak segala bala’ atau sengkolo seperti penyakit, marabahaya, prahara, tragedi. Nilai religius kelima, sebagai bentuk upaya nguri-uri budaya warisan nenek moyang yang penuh nilai kearifan lokal. Nilai religius keenam sebagai bentuk ungkapan rasa sukacita dan kegembiraan warga masyarakat atas segala yang telah diperolehnya dalam satu tahun yang telah berjalan (hasil pertanian,

perdagangan, keterampilan). Pesan moral tersebut tersirat dalam *uborampe* sesaji dan kelengkapan acara yang sebenarnya merupakan simbolisasi dari *pepeling* (pengingat).

Wujud-wujud kegiatan ini memberikan gambaran bahwa tradisi bersih desa telah mengimplementasikan dan memunculkan nilai religius masyarakat kota Batu khususnya di Kelurahan Dadaprejo. Hal ini diwujudkan melalui ucapan syukur atas berbagai rahmat dan juga berkat yang telah mereka dapatkan selama ini. Kegiatan bersih desa juga menggambarkan kepercayaan masyarakat kota Batu atas campur tangan dari Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala yang telah mereka dapatkan selama ini.

Simpulan

Kegiatan bersih desa di kota Batu adalah salah satu bentuk implementasi nilai-nilai karakter budaya bangsa yang dilestarikan melalui tradisi yang terus dirawat dan berkembang dalam masyarakat. Nilai karakter religius yang terdapat dalam tradisi ini terlihat dalam rangkaian kegiatan selama bersih desa, khususnya pada pemberian sesaji kepada danyang desa yang dianggap sebagai leluhur terdahulu atau orang pertama yang membuka desa. Nilai karakter religius pada tradisi bersih desa di Kota Batu, yaitu pertama, bentuk ungkapan rasa syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Kedua, ungkapan rasa terima kasih kepada leluhur desa yang telah “babad alas” atau bedah krawang. Ketiga, perwujudan kepercayaan atas adanya kekuatan alam yang tidak kasatmata yang melindungi desa tersebut seisinya yang diyakini dan disimbolkan sebagai *pundhen*. Keempat, bentuk keinginan dan harapan untuk menolak segala bala. Kelima, bentuk upaya *nguri-uri* budaya warisan nenek moyang yang penuh nilai kearifan lokal. Keenam, bentuk ungkapan rasa sukacita dan kegembiraan warga masyarakat.

Referensi

- Adam, U. K., Yusup, A., Fadlullah, S. F., & Nurbayani, S. (2019). Sesajen sebagai Nilai hidup bermasyarakat di Kampung Cipicung Girang Kota Bandung. *Indonesian Journal of Sociology, Education, and Development*, 1(1), 27-35.
- Adha, M. M., Budimansyah, D., Kartadinata, S., & Sundawa, D. (2019). Emerging volunteerism for Indonesian millennial generation: Volunteer participation and responsibility. *Journal of Human Behavior in the Social Environment*, 29(4), 467-483.
- Endraswara, S. (2006). Mistisisme dalam seni spiritual bersih desa di kalangan penghayat kepercayaan. *Jurnal Kejawaen*, 1(2), 38-57.
- Fasah, R. H. (2018). Eksistensi Bersih Desa Di Desa Blimbing Kecamatan Klabang Kabupaten Bondowoso Tahun 1965-2018.
- Fitriana, R. (2017). *Bentuk dan Fungsi Kesenian Raksasa Dalam Upacara Bersih Desa di Desa Salamrejo Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar* (Doctoral dissertation, Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta).
- Gloriani, Y. (2013). Kajian Nilai-Nilai Sosial Dan Budaya Pada Kakawihan Kaulinan Barudak Lembur Serta Implementasinya Dalam Pembelajaran Bahasa Dan Sastra Indonesia Berbasis Multikultural. *LOKABASA*, 4(2).
- Gultom, A. F. (2014). Refleksi Konseptual Dalihan Na Tolu Dan Porhalaan Pada Etnis Batak Toba Dalam Perspektif Kosmologi. *Filsafat Islam: Historisitas Dan Aktualisasi (Peran Dan Kontribusi Filsafat Islam Bagi Bangsa)*. *Prosiding*, 1, 194-207.
- Ningrum, S. U., & Muthali'in, A. (2018). *Implementasi Nilai Persatuan dalam Pancasila pada Tradisi Bersih Desa (Punden) Studi Kasus di Desa Tambakboyo Kabupaten Sukoharjo Kecamatan Tawang Sari* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Nisrina, D., Widodo, I. A., Larassari, I. B., & Rahmaji, F. (2020). Dampak Konsumerisme Budaya Korea (Kpop) Di Kalangan Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang. *Jurnal Penelitian Humaniora*, 21(1), 78-88.

- Manggala, H. D. A. (2019). Perubahan Sosial di Tosari (Studi Kasus Lunturnya Folklore Masyarakat Desa Tosari, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan). *Indonesian Journal of Sociology, Education, and Development*, 1(2), 96-105.
- Rifa'i, M. K. (2016). Internalisasi nilai-nilai religius berbasis multikultural dalam membentuk insan kamil. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 4(1).
- Setyowati, A., & Hanif, M. (2014). Peran Perempuan Dalam Tradisi Upacara Bersih Desa (Studi Kasus Di Desa Kiringan Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan). *Agastya: Jurnal Sejarah Dan Pembelajarannya*, 4(01), 37-57.
- Sholikhati, N. I., & Rufaidah, D. (2020). Nilai Religius dalam Buku Teks Bahasa Indonesia SMP Kurikulum 2013. *Jurnal Lensa: Kajian Kebahasaan, Kesusastraan, dan Budaya*, 10, 58-68.
- Syafii, N. (2013). *Lunturnya Budaya Permainan Tradisional Bagi Anak-Anak Pada Era Modern Di Desa Sekaran Lamongan* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Ampel Surabaya).
- Thohir, M. (2013). Multikulturalisme. *Agama, Budaya, dan Sastra*. Semarang: Gigih Pustaka Mandiri.
- Yunus, R. (2013). Transformasi nilai-nilai budaya lokal sebagai upaya pembangunan karakter bangsa. *Jurnal Penelitian Pendidikan*, 13(1), 67-79.

Penguatan Karakter Moral Siswa Berbasis Sistem Pendukung Keputusan dengan Metode *Simple Additive Weighting*

Selly Rahmawati ^{a,1*}, Setia Wardani ^b

^{ab} Universitas PGRI Yogyakarta, Indonesia

¹ selly@upy.ac.id*

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 18 Mei 2021;

Revised: 27 Desember 2021;

Accepted: 31 Desember 2021

Kata-kata kunci:

Civic Disposition;

Karakter Moral;

Metode SAW;

Penilaian Tersistem;

Siswa Sekolah Dasar.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penguatan karakter siswa sekolah dasar dengan berbasis sistem pendukung keputusan dengan metode *simple*, *additive* dan *weighting* (SAW). Upaya tersebut didasarkan pada pengembangan penilaian karakter moral yang tersistem untuk siswa Sekolah Dasar. Metode penelitian yang digunakan adalah R&D dengan jenis penelitian ADDIE. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara guru, observasi dan kuesioner. Penelitian ini menemukan bahwa pada tahap analisis, karakter moral dapat diukur secara akuntabel dengan laporan pengamatan perilaku oleh guru. Pada tahap design, terbentuk rancangan sistem penentuan keputusan dari indikator karakter utama program Penguatan Pendidikan Karakter. Tahap development mengembangkan sistem penilaian karakter dengan program Sistem Pendukung Keputusan menggunakan metode SAW. Tahap implementasi dan evaluasi di Sekolah Dasar Negeri Randusari diketahui bahwa sistem tersebut dapat dioperasikan dengan mudah oleh guru tanpa mengalami hambatan teknis. Implementasi pengembangan sistem memudahkan guru menilai karakter siswa. Akses sistem terbuka bagi kepala sekolah dan orangtua siswa menjadi dasar pelaksanaan peran mereka dalam pembentukan karakter moral siswa baik di sekolah maupun di rumah.

ABSTRACT

Reinforcement The Moral Character of Students Based on Decision Support Systems with Simple Additive Weighting Methods. This research aims to find out the strengthening of the character of elementary school students based on decision support systems with simple, additive and weighting (SAW) methods. The effort is based on the development of a systemized moral character assessment for elementary school students. The research method used is R&D with ADDIE research type. The data collection method is done with teacher interviews, observations and questionnaires. The study found that at the analysis stage, moral character could be measured accountable by teacher behavioral observation reports. At the design stage, a decision-making system is formed from the main character indicators of the Character Education Strengthening program. The development stage develops a character assessment system with a Decision Support System using the SAW method. The implementation and evaluation phase at Sekolah Dasar Negeri Randusari is known that the system can be operated easily by teachers without experiencing technical obstacles. Implementation of system development makes it easier for teachers to assess the character of students. Access to the system is open to principals and parents of students to be the basis of the implementation of their role in the formation of moral character of students both at school and at home.

Keywords:

Moral Character;

SAW Method;

Systemized Assessment;

Elementary School Student.

Copyright © 2021 (Selly Rahmawati & Setia Wardani). All Right Reserved

How to Cite : Rahmawati, S., & Wardani, S. (2021). Penguatan Karakter Moral Siswa Berbasis Sistem Pendukung Keputusan dengan Metode Simple Additive Weighting. *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, 6(2), 83-95. <https://doi.org/10.21067/jmk.v6i2.5551>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Pemerintah Indonesia telah mengubah visi pendidikan nasional melalui Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sidiknas pasal 3 yang menyatakan bahwa tujuan Pendidikan Nasional tidak hanya sekedar tentang perolehan prestasi kognitif, namun mengembangkan diri sesuai karakter bangsa. Hal tersebut kemudian didukung dengan *grand design* dalam kurikulum 2013. Pada kurikulum ini, pembelajaran dan pencapaian siswa dilaksanakan dan diukur melalui tiga aspek yaitu kognitif, afektif dan psikomotor yang terintegrasi dengan presentase bobot yang disesuaikan karakteristik siswa per jenjang pendidikan. Semakin rendah jenjangnya, bobot kognitifnya semakin kecil dan berbanding terbalik dengan bobot afektifnya. Pada pembelajaran di sekolah dasar, bobot afektifnya menjadi lebih besar daripada bobot kognitifnya.

Karakteristik usia siswa Sekolah Dasar (SD) dianggap usia yang tepat untuk menanamkan nilai-nilai afektif. *Grand design* pembobotan 3 aspek tersebut sesuai dengan teori perkembangan moral Kohlberg. Desmita (2009) menyatakan bahwa berdasarkan teori Kohlberg perkembangan moral anak SD masuk dalam tahap prakonvensional untuk siswa SD kelas rendah dan tahap konvensional untuk siswa SD kelas tinggi. Tahap prakonvensional lebih ditunjukkan pada sikap patuh. Tahap konvensional yang dimaksud lebih pada kecenderungan bersikap baik agar dipandang sebagai anak yang baik.

Piaget meneruskan penelitian Kohlberg dan berpendapat bahwa pada usia sekolah dasar, perkembangan moral anak berada pada moralitas otonomi. Perbuatan dapat dipandang sebagai perbuatan baik berdasarkan pada pada tujuan perbuatan tersebut. Berbohong dapat menjadi perbuatan yang benar ketika tujuan dari berbohong itu untuk kebaikan. Usia anak sekolah dasar ini merupakan usia urgen untuk melakukan penanaman nilai-nilai (Sujanto, 2012). Pendidikan nilai moral karakter sangat penting pada usia ini untuk menanamkan standar baik dan buruk. Adams (2011) juga membuktikan dalam penelitiannya bahwa pendidikan karakter harus diterapkan mulai pada tingkat pendidikan dasar sehingga membentuk pondasi karakter siswa yang kuat untuk tingkat selanjutnya.

Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia tahun 2018 terdapat 1885 perkara anak. Sejumlah 504 anak merupakan pengguna narkoba, pencuri, dan pelaku tindak asusila. Berdasarkan jumlah tersebut, terdapat 23,9% kasus pencurian, 17,8% narkoba, dan 13,2% tindak asusila yang dilakukan oleh anak-anak. Berdasarkan data tahun 2010 terdapat 62,7% siswi SMP tidak perawan, 21,2% siswi SMP pernah aborsi, dan 97% siswa SMP dan SMA pernah melihat film yang asusila. Tahun 2015 diketahui ada 14% anak SMP dan SMA mendapat bullying dari temannya. Tahun 2015 terdapat 23% anak terlibat dalam perkelahian. Data juga menunjukkan bahwa perkelahian anak/remaja meningkat 1,1% tahun 2018. Kenakalan anak tersebut merupakan indikasi adanya moral karakter dengan *judgment* yang salah.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan di atas, *grand design* pendidikan Indonesia diindikasikan gagal dalam melakukan penanaman nilai moral. Pendidikan di Indonesia cenderung membentuk siswa dengan mementingkan aspek kognitif daripada aspek afektif. Pada tahun 2017 kemudian pemerintah memperkuat pendidikan karakter dengan mengeluarkan Perpres No 87 tahun 2017 tentang Penguatan pendidikan karakter (PPK). PPK merupakan pelaksanaan pendidikan karakter dengan berdasarkan pada nilai-nilai filsafat bangsa. Nilai-nilai tersebut meliputi nilai religius, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan

bertanggungjawab. Untuk menfokuskan penanaman nilai kebangsaan itu disarikan dalam lima nilai utama karakter yaitu religius, nasionalis, mandiri, integritas, dan gotong royong.

Berdasarkan penelitian Prabandari (2020) implementasi pendidikan karakter setelah keluarnya Perpres dilaksanakan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran di kelas serta melalui kultur sekolah. Ada beberapa kendala yaitu tidak semua guru memberikan penilaian sikap/karakter dan terdapat perbedaan pendidikan karakter yang diberikan oleh guru dan orangtua siswa. Desy Irsalina Savitri, I Nyoman Sudana Degeng (2016) melalui penelitiannya juga menemukan bahwa pendidikan karakter telah diintegrasikan pada pembelajaran. Namun, beberapa guru yang dalam pembelajarannya masih mementingkan aspek kognitif saja sehingga penilaian afektif tidak diintegrasikan dalam penilaian pembelajaran. Zuliani et al. (2017) menemukan bahwa guru-guru di SD tidak melaksanakan penilaian afektif/karakter disebabkan tidak memiliki instrumen penilaian afektif/karakter dan ketidakmampuan untuk membuatnya.

Erry Utomo (2011) juga menyatakan pendidikan karakter yang diintegrasikan sebagai *hidden curriculum* pembelajaran perlu dinilai karena menjadi bagian dari pembelajaran yang dilakukan guru. Sementara itu langkah-langkah penguatan karakter sebenarnya telah coba dikembangkan dengan pendekatan klarifikasi dan penanaman nilai (Munjiatun, 2018). Selain itu, berdasarkan penelitian Abdillah Dalimunthe (2016) penguatan pendidikan karakter juga dilakukan dalam bentuk pengintegrasian pada mata pelajaran, internalisasi, pembangunan kebiasaan, dan membudayakan nilai dalam suasana sekolah. Namun berdasarkan penelitian (Wijanarti et al., 2019) ditemukan bahwa integrasi nilai PPK di sekolah belum terimplementasi dengan baik, Integrasi tersebut terkendala beberapa masalah. Salah satu diantaranya adalah bahwa guru belum mampu melakukan penilaian sikap karena instrumen dan penilaian sikap yang berbeda dengan penilaian kognitif dimana guru harus mengamati siswanya satu persatu dan melakukan penilaian. Selain itu, belum ada evaluasi terkait integrasi PPK di sekolah.

Penilaian karakter penting dilakukan dalam pembelajaran bukan hanya untuk menilai keberhasilan penanaman karakter siswa tapi juga untuk melihat perkembangan karakter siswa. Upaya mengetahui hasil penilaian karakter tersebut maka proses pembelajaran dapat dilanjutkan dengan upaya-upaya yang tepat untuk pengembangan atau penguatan karakter siswa. Hal mengenai pentingnya penilaian karakter tersebut maka perlu instrumen penilaian yang tepat untuk mengetahui keberhasilan penanaman nilai-nilai karakter. Karakter moral dapat dikonseptualisasikan sebagai disposisi individu untuk berpikir, merasakan, dan berperilaku dengan cara yang etis versus tidak etis, atau sebagai bagian dari perbedaan individu yang relevan dengan moralitas. Ada model tripartit karakter moral, dengan gagasan bahwa karakter moral memiliki unsur motivasi, kemampuan, dan identitas.

Unsur motivasi adalah tindakan yang sebelumnya mempertimbangkan orang lain dan kebutuhan orang lain serta bagaimana tindakan seseorang akan memengaruhi orang lain. Pertimbangan seperti itu memotivasi orang untuk memperlakukan orang lain dengan baik dan menghindari melakukan hal yang buruk. Unsur kemampuan adalah pengaturan diri atau kapasitas seseorang untuk melakukan yang baik dan menghindari melakukan yang buruk (kemampuan). Unsur identitas adalah identitas moral yang mengacu pada kecenderungan untuk menghargai moralitas dan ingin memandang diri sendiri sebagai pribadi yang bermoral (Cohen & Morse, 2014).

Orang yang memiliki perilaku yang buruk cenderung menafsirkan perilakunya sebagai tindakan yang tidak berbahaya bagi orang lain, sehingga dia melanggar tanpa merasa bahwa prinsip-prinsip moral telah dilanggar. Orang yang melepaskan diri secara moral menggunakan

serangkaian teknik mental yaitu mekanisme penalaran kognitif untuk memisahkan standar moral mereka dari perilaku moral mereka (Moore et al., 2012).

Kemampuan penalaran moral disebut sebagai perkembangan moral kognitif yang mengacu pada penilaian tentang dilema moral hipotetis (pendugaan tentang pemikiran apa yang melatarbelakangi tindakan moral seseorang). Penilaian moral yang dilakukan dilihat dari pemikiran yang melatarbelakangi pengambilan tindakan moral tersebut. Menurut teori, kemampuan penalaran moral berkembang dari waktu ke waktu di enam tahap penilaian moral dengan setiap tahap mewakili struktur yang koheren pemikiran (Kohlberg & Goslin Ed, 1969). Pada tahap awal, individu memandang perilaku sebagai salah ketika itu menghasilkan hukuman dan bermoral ketika memuaskan kepentingan seseorang. Pada tahap tengah, perilaku adalah dianggap bermoral bila sesuai dengan aturan masyarakat tentang benar dan salah dan dilakukan dengan niat baik. Sedangkan pada tahap akhir penilaian seseorang bermoral berdasarkan seberapa baik mereka menjunjung tinggi prinsip moral abstrak seperti keadilan. Bentuk pemikiran ini dianggap sebagai puncak kemampuan penalaran moral karena individu mampu menyadari bahwa konsepsi sosial tentang moralitas bisa jadi digantikan dan diubah.

Beberapa penelitian lain yang hasil tidak didasarkan pada ukuran langsung perilaku, melainkan pada laporan diri siswa tentang perubahan perilaku mereka. Walaupun beberapa dari studi terbukti menghasilkan temuan yang signifikan secara statistik, namun validitas untuk kesimpulan yang diambil dari mereka masih dipertanyakan. Ketika peneliti berangkat untuk menentukan apakah perubahan perilaku adalah suatu hasil pendidikan karakter dan hanya mengukur sikap tentang program, atau sikap tentang hasil, dan sering sikap pihak ketiga, kesimpulan tentang perilaku paling tidak dapat disimpulkan. Selain itu, saat menggunakan kualitatif Pengukuran perubahan sikap penting untuk mengukur sikap sebelum intervensi maupun setelah intervensi. Sebagai alternatif, beberapa kemajuan telah dibuat dalam mengukur hasil yang konsisten dengan pertanyaan penelitian.

Permasalahan lainnya adalah ketika program pendidikan karakter dimana guru berada dalam program tersebut, maka cenderung mengembangkan harapan yang lebih tinggi terhadap perilaku siswa. Akibatnya, setelah pelaksanaan program pendidikan karakter peringkat perilaku siswa dapat dibuat dengan menggunakan standar yang lebih tinggi. Masalah validitas terjadi bila hanya menggunakan ukuran perilaku tidak langsung (laporan sendiri dan laporan orang lain). Pengumpulan data berbasis catatan juga dapat mengancam validitas. Sistem pencatatan sering kurang kontrol kualitas dan mungkin berisi data yang tidak lengkap atau bahkan tidak akurat. Harapan peneliti atau pelapor data mungkin secara tidak sengaja memengaruhi praktik penilaian. Untuk menghilangkan potensi bias ini, harus dapat dilakukan sistem pengukuran karakter yang meminimalkan ancaman ini terhadap validitas internal.

Berdasarkan penelitian Berry et al. (2012) ditemukan bahwa perilaku pribadi yang tidak diinginkan, seperti kenakalan, dan keputusan tidak etis, lebih baik diprediksi dengan laporan diri daripada oleh laporan pengamat karena orang termotivasi untuk menyimpan tindakan ini, dan kecenderungan terhadap tindakan ini akan disembunyikan. Carlson (2010) Perilaku yang lebih umum dan kurang tidak diinginkan mungkin lebih setuju untuk prediksi oleh laporan pengamat. Secara lebih lanjut, penelitian Cohen et al. (2013) menemukan bahwa orang terdekat (yang telah mengenal dengan baik) memiliki kemampuan mengamati karakter moral dan dapat menilai secara akurat karakter moral orang-orang terdekat.

Sistem pendukung keputusan adalah sistem berbasis komputer interaktif yang membantu pengguna untuk melakukan penilaian dan pemilihan. Sistem tidak hanya

menyediakan penyimpanan dan pengambilan data tapi juga meningkatkan akses informasi tradisional dengan dukungan untuk pembuatan model pengambilan keputusan dan penalaran berbasis model (Druzdzal & Flynn, 2011). Sistem ini sangat cocok untuk membantu guru melakukan penilaian karakter siswa. Namun belum ada Sistem Pendukung Keputusan (SPK) penilaian karakter di Indonesia. Untuk itu perlu dibuatkan SPK untuk melakukan penilaian karakter sehingga guru-guru Sekolah Dasar (SD) tidak lagi mengalami kesulitan untuk melakukan penilaian karakter dan dapat melakukan umpan balik pengembangan karakter dengan tepat sesuai sasaran.

Metode

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode jenis *research and development* (R&D). design yang digunakan adalah model ADDIE (Analysis, Design, Development, Implementation, Evaluation). Objek penelitian ini adalah sistem pengambil keputusan untuk menilai moral karakter siswa Sekolah Dasar. Subjek yang diteliti yaitu guru SD Negeri Randusari yang menggunakan sistem penentuan ppenilaian karakter siswa SD yang kami kembangkan. Proses pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan kuesioner dengan instrumen pengumpulan data yaitu lembar observasi dan lembar review guru. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan deskriptif kualitatif.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah dan guru kelas 2 dan guru kelas 5, peneliti menemukan temuan data di SD N Randusari bahwa SD N Randusari telah menerapkan kurikulum 2013 dan melaksanakan penilaian otentik. Dwi Nurwibowo, S.Pd selaku guru kelas 5 menyatakan bahwa beliau tidak memiliki instrumen khusus untuk mengukur karakter siswa. Penilaian afektif atau karakter siswa selama ini dilakukan secara sederhana tanpa instrument maupun rubrik penilaian. Beliau menyatakan bahwa pembuatan atau pengembangan instrument penilaian afektif sulit untuk dilakukan karena rumitnya proses pembuatan dan keterbatasan waktunya untuk melakukan hal tersebut.

Hasil observasi pembelajaran di kelas 2 dan kelas 5 menemukan bahwa guru telah melakukan penilaian proses dan hasil pada aspek kognitif, afektif dan psikomotor pada siswa. Hal tersebut terlihat pada pemberian test harian untuk menilai aspek kognitif siswa dan penugasan untuk menilai aspek psikomotor siswa. Selain itu, guru juga melakukan penilaian aspek afektif dengan melakukan pengamatan sikap siswa dalam komunikasi saat pembelajaran. Berdasarkan dokumen-dokumen penilaian guru SDN Randusari, ditemukan bahwa guru telah memiliki instrument penilaian aspek kognitif dan psikomotor yang lengkap. Namun dalam aspek afektif, guru melakukan penilaian dengan lembar pengamatan sederhana.

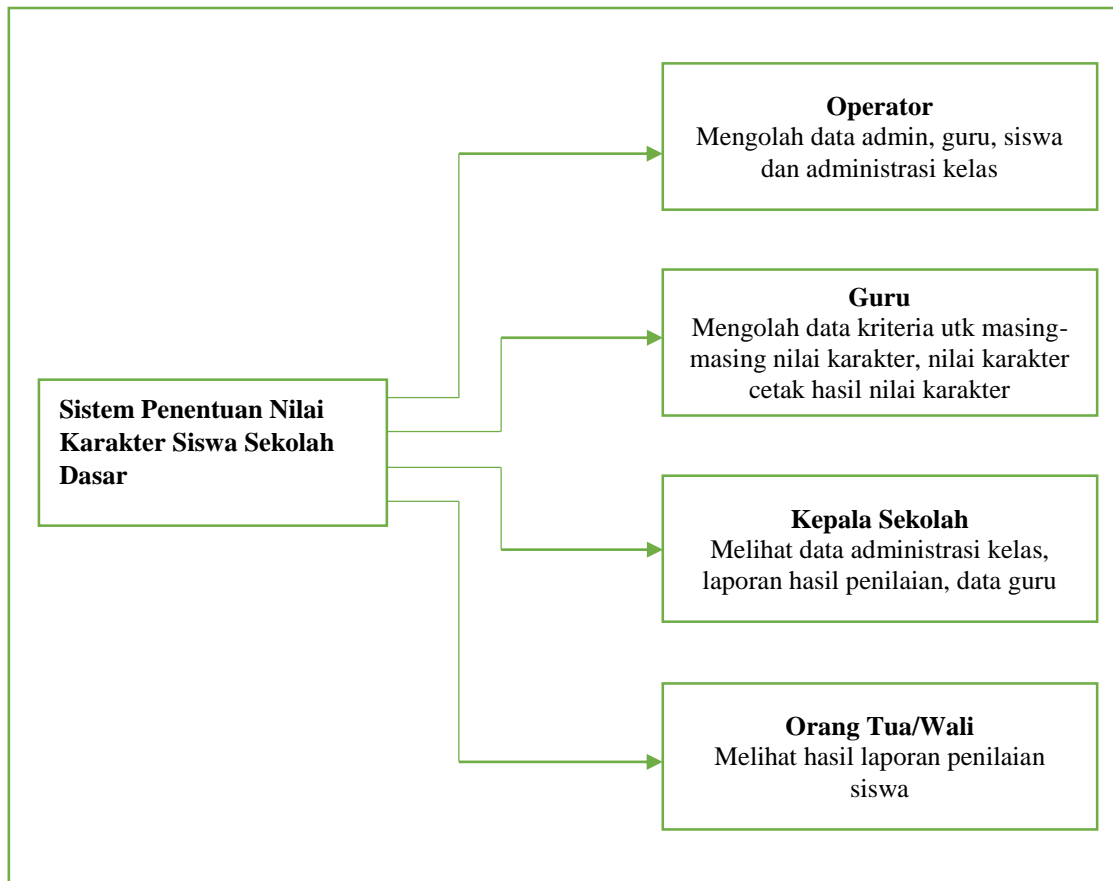
Berdasarkan fakta yang terjadi di SD diketahui bahwa guru tidak memiliki dan mengembangkan instrumen penilaian afektif atau karakter siswa. Guru kesulitan mengembangkan instrumen secara mandiri karena kurangnya pengetahuan terkait instrument penilaian karakter. Penilaian dilakukan secara sederhana tanpa instrumen maupun rubrik penilaian sehingga penilaian tersebut sangat subjektif karena banyak faktor yang mempengaruhi penilaian tersebut seperti faktor prestasi kognitif siswa, faktor kedekatan siswa dan guru, dan masih banyak faktor lainnya yang juga mempengaruhi penilaian karakter guru. Padahal penilaian karakter harus dilakukan dengan tepat sehingga guru dapat melakukan umpan balik atas hasil penilaian tersebut.

Setelah melakukan analisis tersebut dapat diidentifikasi beberapa masalah: pertama, guru SDN Randusari tidak memiliki dan mengembangkan instrumen penilaian afektif. Kedua, penilaian afektif yang dilakukan guru SDN Randusari bersifat subyektif karena dilakukan tanpa instrumen dan rubrik penilaian. Peneliti kemudian mendesain solusi dari permasalahan tersebut yaitu sebuah sistem penilaian karakter yang dapat membantu guru dalam membuat keputusan terkait program Pendidikan karakter yang dilakukan di kelasnya. Untuk membuat sistem tersebut maka peneliti kemudian menjabarkan definisi dari karakter moral dan bagaimana cara yang tepat untuk mengukurnya serta apa saja indikator karakter utama dari program PPK yang dapat mewakili ukuran *outcomes* dari hasil PPK.

Setelah tahap desain, peneliti kemudian melanjutkan pada tahap pengembangan. Berdasarkan desain di atas maka peneliti mengembangkan sistem penilaian karakter dengan program Sistem Pendukung Keputusan (SPK). Sistem pendukung keputusan adalah sistem berbasis komputer interaktif yang membantu pengguna untuk melakukan penilaian dan pemilihan. Sistem tidak hanya menyediakan penyimpanan dan pengambilan data tapi juga meningkatkan akses informasi tradisional dengan dukungan untuk pembuatan model pengambilan keputusan dan penalaran berbasis model (Druzdzet & Flynn, 2011).

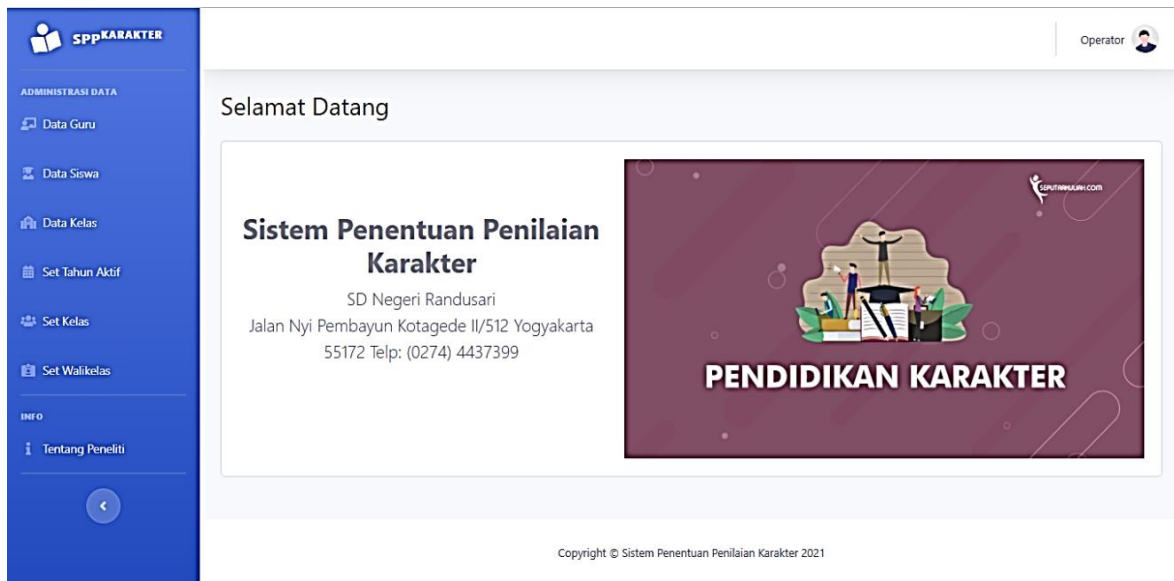
Sistem ini sangat cocok untuk membantu guru melakukan penilaian karakter siswa. Namun belum ada Sistem Pendukung Keputusan (SPK) penilaian karakter di Indonesia. Untuk itu perlu dibuatkan SPK untuk melakukan penilaian karakter sehingga guru-guru Sekolah Dasar (SD) tidak lagi mengalami kesulitan untuk melakukan penilaian karakter dan dapat melakukan umpan balik pengembangan karakter dengan tepat sesuai sasaran. Adapun sistem yang dikembangkan adalah sebagai pada bagan 1 berikut:

Bagan 1. Alur kerja sistem penentuan nilai karakter siswa SD



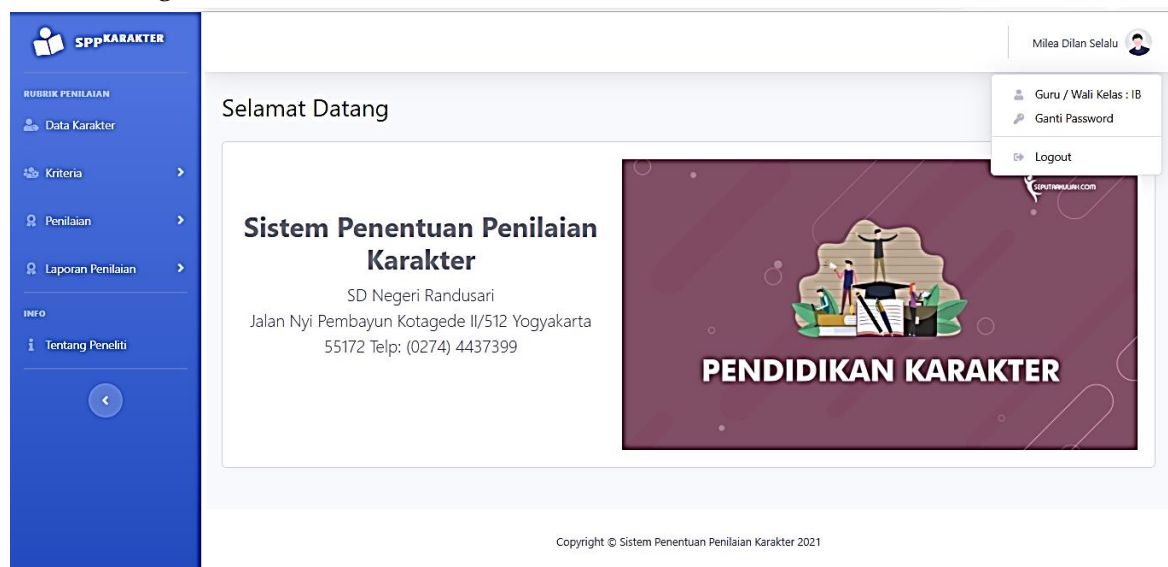
Sistem pendukung keputusan ini dikembangkan dengan metode SAW (Simple Additive Weighting) yaitu konsep dasar metode ini ialah mencari penjumlahan terbobot dari setiap kinerja pada setiap alternatif terhadap semua atribut (kriteria). Nilai matrik keputusan (X) haruslah dinormalisasi ke suatu skala yang dapat diperbandingkan dengan semua rating alternatif yang ada.

Pada sistem yang dikembangkan terdapat 3 menu yaitu login (hanya user dengan hak akses Kepala sekolah, Guru dan operator yang dapat mengakses halaman login, untuk masuk ke sistem utama), hasil pencarian (menu hasil pencarian bisa digunakan oleh semua user tanpa hak akses) dan tentang peneliti (berisi halaman informasi tentang peneliti dan sekilas tentang sistem).



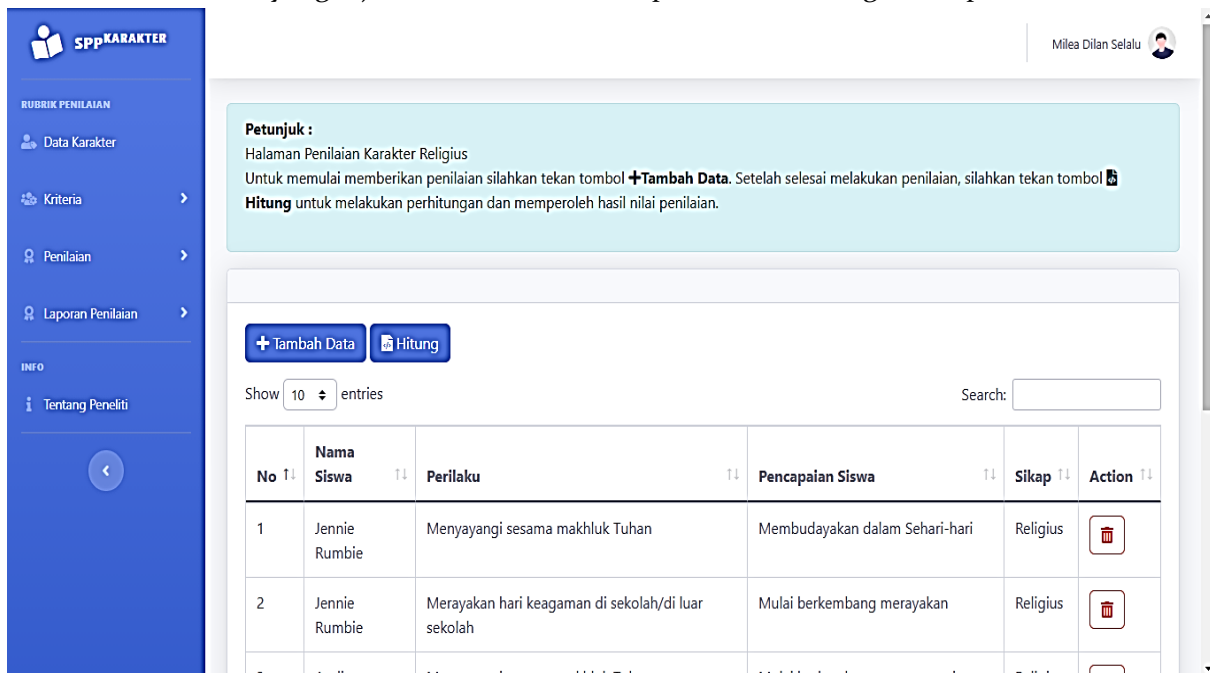
Gambar 1. Tampilan sistem penentuan nilai karakter siswa SD untuk Operator

Pada tampilan sistem penentuan nilai karakter untuk operator, terdapat 7 menu utama di sidebar yaitu data guru, data siswa, data kelas, set tahun aktif, set kelas, set walikelas dan tentang peneliti. Operator memiliki hak akses untuk memasukkan data maupun menghapus data-data tersebut. Sedangkan pada tampilan sistem penentuan nilai karakter untuk guru adalah sebagai berikut.



Gambar 2. Tampilan sistem penentuan nilai karakter untuk guru

Pada tampilan terdapat tujuh menu utama di sidebar yaitu data karakter, kriteria (kriteria perilaku penilaian, bobot penilaian, indikator penilaian), penilaian (religius, mandiri, nasionalis, integritas, gotong-royong), dan laporan penilaian serta tentang peneliti. Pada menu penilaian tersebut digunakan guru untuk memasukkan data perilaku siswa sesuai aspek 5 karakter utama PPK yang dijabarkan dalam beberapa indikator dengan tampilan berikut.



Petunjuk :
Halaman Penilaian Karakter Religius
Untuk memulai memberikan penilaian silahkan tekan tombol **+Tambah Data**. Setelah selesai melakukan penilaian, silahkan tekan tombol **Hitung** untuk melakukan perhitungan dan memperoleh hasil nilai penilaian.

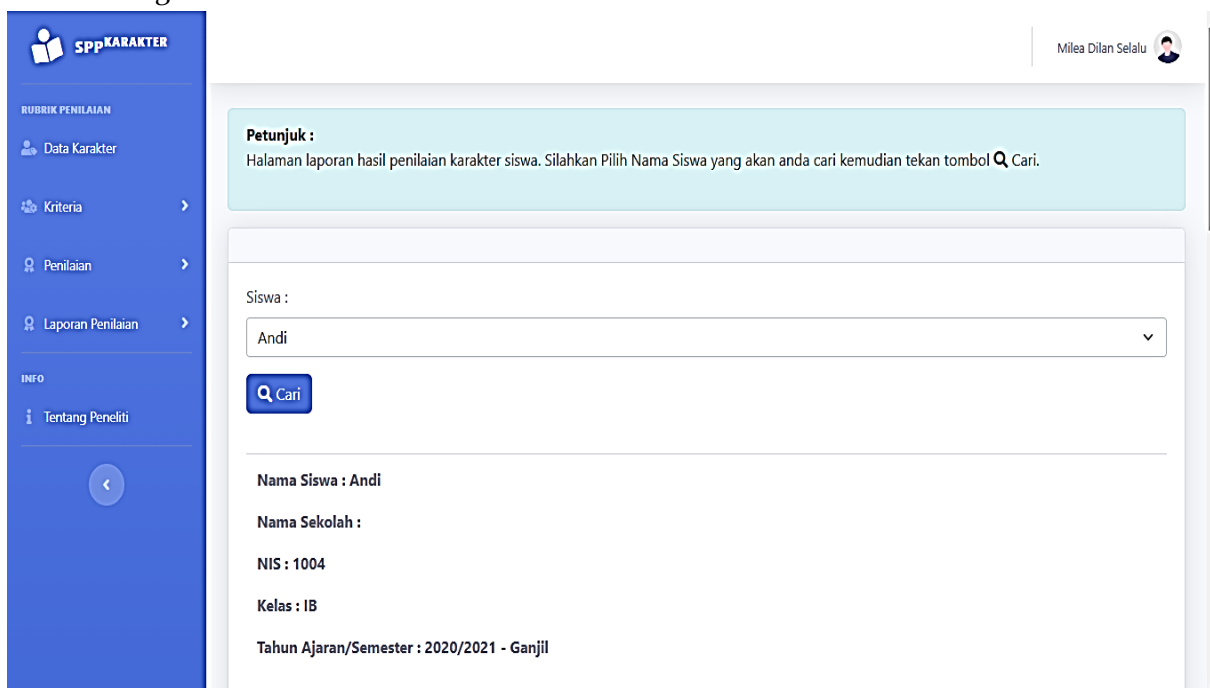
+ Tambah Data Hitung

Show 10 entries Search:

No	Nama Siswa	Perilaku	Pencapaian Siswa	Sikap	Action
1	Jennie Rumbie	Menyayangi sesama makhluk Tuhan	Membudayakan dalam Sehari-hari	Religius	
2	Jennie Rumbie	Merayakan hari keagamaan di sekolah/di luar sekolah	Mulai berkembang merayakan	Religius	
3	Andi	Menyayangi sesama makhluk Tuhan	Mulai berkembang merayakan	Religius	

Gambar 3. Tampilan menu penilaian pada sistem guru

Skala penilaian guru dalam sistem ini terbagi dalam 4 skala yaitu membudaya (skor 4), berkembang (skor 3), mulai berkembang (skor 2) dan memerlukan bimbingan (skor 1). Sedangkan pada halaman laporan penilaian ini merupakan menu yang dapat dilihat oleh semua pengguna termasuk kepala sekolah dan orangtua siswa. Tampilan menu laporan penilaian ini adalah sebagai berikut.



Petunjuk :
Halaman laporan hasil penilaian karakter siswa. Silahkan Pilih Nama Siswa yang akan anda cari kemudian tekan tombol **Cari**.

Siswa :
Andi

Cari

Nama Siswa : Andi
Nama Sekolah :
NIS : 1004
Kelas : IB
Tahun Ajaran/Semester : 2020/2021 - Ganjil

Karakter	Perilaku yang diamati	Indikator
Religius	Menyayangi sesama makhluk Tuhan	Mulai berkembang menyayangi sesama
	Merayakan hari keagamaan di sekolah/di luar sekolah	Mulai berkembang merayakan
Nasionalis	Menyanyikan lagu nasional	Belum lagu nasional
	Mengikuti Upacara bendera di sekolah	Berkembang ikut upacara
Mandiri	Mengerjakan PR sendiri	PR tidak selesai
	Selalu berangkat sendiri	Tidak setiap hari berangkat sendiri
Gotong-royong	Membuang sampah ketempat sampah	perlu bimbingan membuang sampah
	Membersihkan ruang kelas	berkembang piket
Integritas	Selalu disiplin waktu di sekolah/di rumah	mulai belajar disiplin
	Menerapkan kejujuran dalam setiap kegiatan	selalu jujur

Karakter	Nilai
Religius	6.5
Nasionalis	6.418
Mandiri	7.335
Gotong-royong	5.999
Integritas	9

Kategori Capaian	Penjelasan
Memerlukan Bimbingan	Peserta didik belum menampilkan perilaku yang dinyatakan dalam rubrik perilaku.
Mulai Berkembang	Peserta didik menampilkan perilaku yang dinyatakan dalam rubrik perilaku tapi belum konsisten.
Berkembang	Peserta didik mulai konsisten menampilkan perilaku yang dinyatakan dalam rubrik perilaku.
Membudaya	Peserta didik selalu konsisten menampilkan perilaku yang dinyatakan dalam rubrik perilaku.

Gambar 4. Laporan penilaian pada sistem

Setelah pengembangan selesai dilakukan maka kemudian dilakukan tahap implementasi dan evaluasi pada SDN Randusari dengan melakukan proses review. Proses review dilakukan oleh ahli Sistem Informasi dan ahli materi. Ahli sistem yang menjadi reviewer sistem yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah dosen prodi Informatika UPY yaitu Bapak Rianto, M.Kom. Sedangkan ahli materi yang melakukan review sistem ini adalah dosen PPKn UPY yaitu bapak Ari Wibowo, M.Pd. Selain itu review juga dilakukan oleh calon pengguna sistem yaitu Guru SDN Randusari yaitu Bapak Dwi Nurwibowo, S.Pd.

Berdasarkan hasil observasi dan lembar review ahli materi diketahui bahwa karakter dan indikator yang akan dinilai dalam instrument penilaian karakter pada sistem telah sesuai secara teoritik dan sesuai untuk mendukung tujuan pengembangan sistem secara keseluruhan.

Tabel 1. Hasil review ahli materi saat menggunakan sistem penentuan nilai karakter siswa SD

No.	Aspek Penilaian	Kriteria
1.	Karakter yang dinilai dalam sistem yang dikembangkan sesuai untuk penilaian Penguatan Pendidikan Karakter (PPK)	Sangat sesuai
2.	Indikator sikap/perilaku yang akan dinilai dalam sistem yang dikembangkan sesuai secara teoritik untuk menilai karakter yang akan dinilai	Sangat sesuai
3.	Sikap/perilaku yang akan dinilai dalam sistem yang dikembangkan mendukung tujuan pengembangan sistem secara keseluruhan	Sangat sesuai
4.	Pernyataan sikap/perilaku yang akan dinilai, mudah dipahami dan tidak ambigu	Sesuai
5.	Sikap/perilaku karakter yang akan dinilai merupakan sikap atau perilaku yang dapat ditemui/diobservasi saat pembelajaran	Sesuai

Berdasarkan hasil observasi dan lembar review ahli sistem informasi diketahui bahwa desain tampilan dan komunikasi visual sistem yang dikembangkan masuk dalam kriteria baik. Sedangkan sistem rekayasa perangkat lunak pada sistem yang dikembangkan juga telah berjalan dengan baik dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 2. Hasil review ahli sistem informasi saat menggunakan sistem penentuan nilai karakter

No	Aspek	Indikator	Kriteria
1.	Desain Tampilan dan Komunikasi Visual	Tampilan produk	Baik
		Fasilitas kepada user	Baik
		Efek suara, teks, dan gambar	Baik
		Desain, bentuk, dan tata letak	Baik
2.	Rekayasa Perangkat Lunak	Interaktivitas dan kemudahan untuk dimengerti	Baik
		Reliabilitas/kehandalan	Baik
		Pemeliharaan/pengelolaan	Baik
		Usabilitas/kemudahan pengoperasian	Baik
		Ketepatan pemilihan aplikasi	Baik
		Kompatibilitas/kemudahan instalasi program	Baik
		Pemaketan program	Baik
		Kelengkapan dokumen dalam program	Baik
Reusabilitas/pemanfaatan kembali	Baik		

Berdasarkan hasil observasi dan lembar review ahli materi, diketahui bahwa sistem tersebut dapat dioperasikan dengan mudah oleh guru tanpa mengalami hambatan teknis. Selain itu berdasarkan lembar review diketahui sebagai berikut.

Tabel 3. Hasil review guru saat menggunakan sistem penentuan nilai karakter siswa SD

No	Aspek Penilaian	Kriteria
1.	Menu sistem penentuan nilai karakter siswa SD sesuai kebutuhan guru dalam melakukan penilaian karakter	Sangat Baik
2.	Ketepatan penempatan dan penggunaan tombol	Baik
3.	Kemudahan pengoperasian sistem untuk guru	Baik
4.	Waktu yang dibutuhkan ketika sistem ini berjalan	Baik
5.	Sistem ini memiliki fungsi guru dalam melakukan penilaian karakter	Sangat Baik

Berdasarkan hasil tersebut maka diketahui bahwa sistem telah dapat digunakan dengan baik oleh guru sehingga penilaian karakter siswa di SD Negeri Randusari dapat segera menerapkan sistem tersebut dan hasil penilaian karakter siswa dapat memenuhi prinsip-prinsip penilaian yang baik. Melalui sistem penentuan nilai karakter yang dikembangkan oleh peneliti ini karakter moral dapat diukur secara akuntabel dengan laporan pengamatan perilaku oleh guru. Akuntabilitas penilaian sistem ini dapat dijamin dengan melihat kriteria sikap atau perilaku yang menjadi tolak ukur dalam penilaian karakter. Kriteria sikap dan perilaku tersebut sangat rinci dan telah direview oleh ahli materi. Karakter moral dalam konteks akuntabilitas adalah sebagai sistem kontrol yang bertanggung-jawab yang menjadi indikator pada bagian dalam penguatan karakter moral. Indikator pengamatan moral peserta didik yang dilakukan guru bisa dipertanggung-jawabkan secara sah. Di sini, karakter moral diupayakan ada dalam sistem penilaian dan menjadi bagian internal yang didukung dalam metode *simple additive weighting*. Konsep dasar pada metode SAW adalah mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif di semua atribut. Metode SAW membutuhkan proses normalisasi matriks keputusan (X) ke suatu skala yang dapat diperbandingkan dengan semua rating alternatif yang ada (Adianto, Arifin, & Khairina, 2017).

Hasil review tersebut menyatakan bahwa kriteria sikap dan perilaku tersebut telah sesuai secara teoritik dan mendukung untuk menilai karakter PPK. Dengan kriteria sikap dan perilaku yang rinci dan sesuai teori maka rubrik penilaian tersebut dapat menjadi kontrol atau batasan yang menjamin penilaian akan berjalan secara akuntabel bebas dari faktor-faktor subyektif. Dengan sistem penentuan nilai karakter siswa SD ini, karakter moral diobjektifikasi dalam bentuk butir-butir kriteria sikap atau perilaku dalam rubrik penilaian pada sistem. Hal tersebut membuat karakter moral dapat dinilai oleh guru secara akuntabel.

Selain itu seperti yang telah digambarkan dalam gambar 1, sistem tersebut selain dapat diakses oleh guru juga dapat diakses oleh kepala sekolah dan orangtua siswa dengan harapan bahwa hasil penilaian tersebut nantinya tidak hanya mempengaruhi guru dalam pembelajaran, namun juga kebijakan sekolah dan orangtua siswa. Sebab pendidikan karakter tidak hanya tanggungjawab guru dan sekolah saja, namun juga menjadi tanggungjawab orangtua siswa.

Heryanto (2017) dalam penelitiannya menyatakan bahwa penilaian pembelajaran secara terintegrasi mempermudah guru dan kepala sekolah dalam menentukan kebijakan selanjutnya. Selain itu penelitian tersebut juga membuktikan bahwa penilaian pembelajaran yang terintegrasi berpengaruh baik terhadap pembentukan karakter siswa. Menurut Berkowitz & Bier (2015), pendidikan karakter yang sehat artinya memberdayakan semua kelompok pemangku kepentingan, termasuk kelompok yang secara tradisional tidak diberdayakan seperti siswa, staf pendukung, dan orang tua. Pemodelan peran dari orang tua sangat penting dalam berfungsi dengan baik pendidikan karakter; perilaku dan praktik orang dewasa dalam kehidupan siswa harus sejalan dengan misi moral sekolah. Hal tersebut sesuai dengan penelitian Sunarni, (2018) yang menekankan bahwa peran orangtua menjadi hal terpenting dalam pembentukan karakter anak sehingga tanggung jawab orang tua terhadap pembentukan karakter anak perlu menjadi perhatian utama mereka.

Simpulan

Berdasarkan penelitian ini ditemukan bahwa penilaian karakter secara akuntabel perlu dilakukan untuk mendukung program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK). Penilaian karakter dapat dilakukan dengan melakukan observasi terhadap perilaku. Penilaian perilaku menggambarkan karakter anak. Penilaian karakter dapat dilakukan menggunakan instrumen

observasi (pengamatan) dan akan lebih akurat bila dilakukan oleh orang terdekat. Penilaian menggunakan sistem penentuan nilai karakter siswa SD dengan metode SAW yang telah dikembangkan dalam penelitian ini terbukti membantu memudahkan guru dalam menilai karakter siswa. Selain itu, sistem tersebut juga membuka akses bagi kepala sekolah dan orang tua siswa untuk melihat bagaimana karakter siswa sehingga hasil penilaian dari sistem tersebut dapat menjadi rekomendasi bagi kepala sekolah dan guru dalam membuat kebijakan terkait pendidikan karakter. Hasil penilaian sistem tersebut juga dapat menjadi rekomendasi bagi orangtua siswa untuk melaksanakan perannya dalam pembentukan karakter anak di rumah.

Referensi

- Abdillah Dalimunthe, R. A. (2016). Strategi Dan Implementasi Pelaksanaan Pendidikan Karakter Di Smp N 9 Yogyakarta. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 1, 102–111. <https://doi.org/10.21831/jpk.voi1.8616>
- Adams, A. (2011). the Need for Character Education. *International Journal of Social Sciences and Humanity Studies*, 3(2), 23–32.
- Adianto, T. R., Arifin, Z., & Khairina, D. M. (2017). Sistem pendukung keputusan pemilihan rumah tinggal di perumahan menggunakan metode simple additive weighting (saw)(studi kasus: Kota samarinda). Prosiding 2nd SAKTI.
- Berkowitz, M. W., & Bier, M. (2015). Character education: Parents as partners. *Educational Leadership: Journal of the Department of Supervision and Curriculum Development*, 63(1), 64–69.
- Berry, C. M., Carpenter, N. C., & Barratt, C. L. (2012). Do other-reports of counterproductive work behavior provide an incremental contribution over self-reports? A meta-analytic comparison. *Journal of Applied Psychology*, 97(3), 613–636. <https://doi.org/10.1037/a0026739>
- Carlson, S. V. and E. N. (2010). Who knows what about a person? The self–other knowledge asymmetry (SOKA) model. *Journal of Personality and Social Psychology*, 98(2), 281–300. <https://doi.org/10.1002/cjce.5450820530>
- Cohen, T. R., & Morse, L. (2014). Moral character: What it is and what it does. *Research in Organizational Behavior*, 34, 43–61. <https://doi.org/10.1016/j.riob.2014.08.003>
- Cohen, T. R., Panter, A. T., Turan, N., Morse, L., & Kim, Y. (2013). Agreement and similarity in self-other perceptions of moral character. *Journal of Research in Personality*, 47(6), 816–830. <https://doi.org/10.1016/j.jrp.2013.08.009>
- Desmita. (2009). *Psikologi Perkembangan Peserta Didik*. Remaja Rosdakarya. Bandung
- Desy Irsalina Savitri, I Nyoman Sudana Degeng, S. A. (2016). Peran Keluarga Dan Guru Dalam Membangun Karakter Dan Konsep Diri Siswa Broken Home Di Usia Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian, Dan Pengembangan*, 1(5), 861–864.
- Druzdzel, M. J., & Flynn, R. R. (2011). Decision support systems. *Understanding Information Retrieval Systems: Management, Types, and Standards*, 461–472. <https://doi.org/10.1177/0193841x8500900105>
- Erry Utomo. (2011). The Development of Character Education and Its Implementation at Educational Unit in Indonesia. *Journal of Educational Research and Policy*, 3(1), 26–36.
- Heryanto. (2017). Model Penilaian Hasil Belajar dan Karakter. *Jurnal Pendidikan Sosial Dan Ekonomi*, VI(2), 199–216.
- Kohlberg, L., & Goslin Ed./, D. A. (1969). *Stage and Sequence; The Cognitive-Developmental Approach to Socialization*.
- Moore, C., Detert, J., Trevino, L. K., Baker, V. L., & Mayer, D. M. (2012). Why Employees Do Bad Things : Moral Disengagement and Unethical. *Personnel Psychology*, 65, 1–48.
- Munjiatun. (2018). Penguatan Pendidikan Karakter. *Jurnal Kependidikan*, 6(2), 334–349.
- Prabandari, A. siwi. (2020). Implementasi Pendidikan Karakter Di Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 2(1), 68–71. <https://doi.org/10.32585/jdb.v2i1.182>
- Sujanto, A. (2012). *Psikologi Perkembangan*. Rineka Cipta. Jakarta

- Sunarni, D. hayantina. (2018). The Parent Role In Early Childhood Character Building (Descriptive Study at SPS Dahlia Desa Sundawenang Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi). *Journal Empowerment*, 7(2), 319–327.
- Wijanarti, W., Degeng, I. N. S., & Untari, S. (2019). Problematika Pengintegrasian Penguatan Pendidikan Karakter pada Pembelajaran Tematik. *Jurnal Pendidikan*, 4(3), 393–398.
- Zuliani, D., Florentinus, T. S., & Ridlo, S. (2017). Pengembangan Instrumen Penilaian Karakter pada Siswa Kelas IV Sekolah Dasar. *Journal of Research and Educational Research Evaluation*, 6(1), 46–54. <https://doi.org/10.15294/jrer.v6i1.16207>

Tracing 'Profil Pelajar Pancasila' Within The Civic Education Textbook: Mapping Values For Adequacy

Ravyansah^{a,1}, Fauzi Abdillah^{b,2*}

^{ab} Universitas Negeri Jakarta, Indonesia

¹ ravyansah_ppkn17s1@mahasiswa.unj.ac.id, ² abdillah@unj.ac.id*

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 26 Agustus 2021;
Revised: 28 Desember 2021;
Accepted: 31 Desember 2021

Keywords:

Character;
Profil Pelajar Pancasila;
Pancasila and Citizenship
Education;
Textbook.

ABSTRACT

The goal of this study was to map and analyze the character values of the Pancasila Student Profile in the Pancasila and Civic Education textbook for Junior High School (JHS) Grade IX. This study employs a qualitative approach with content analysis methods. The primary data source is the Pancasila and Civic Education textbook for JHS Grade IX, 2018 revised edition. The character values of the Pancasila Student Profile, which are spread throughout the book, serve as the unit of analysis in this study. Data is gathered by identifying and analyzing within the framework of the Pancasila Student Profile character values found in the textbook. Validation of data through semantic validity, inter-rater reliability, and expert review. This study's conclusion generally identifies the Profil Pelajar Pancasila's character values with scattered patterns and varying weights. In order to support the implementation of the Pancasila Student Profile, this study recommends that the government modify the content and content to be more representative and relevant to the most recent learning outcomes.

Kata-kata kunci:

Karakter;
Profil Pelajar Pancasila;
Buku Teks;
Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan.

ABSTRAK

Pemetaan dan Penelusuran Profil Pelajar Pancasila dalam Buku Teks Pendidikan Kewarganegaraan. Tujuan penelitian ini untuk memetakan dan menganalisis muatan nilai karakter Profil Pelajar Pancasila dalam buku teks Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas IX Sekolah Menengah Pertama (SMP). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis konten. Sumber data primer adalah buku teks Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas IX SMP edisi revisi 2018. Unit analisis dalam penelitian ini muatan nilai karakter Profil Pelajar Pancasila yang tersebar dalam semua bagian buku. Pengumpulan data dilakukan dengan mengidentifikasi dan menganalisis dalam kerangka muatan nilai karakter Profil Pelajar Pancasila yang ada di dalam buku teks. Pemeriksaan keabsahan data melalui validitas semantik, reliabilitas inter-rater, dan expert review. Kesimpulan penelitian ini secara umum mengidentifikasi muatan nilai karakter Profil Pelajar Pancasila dengan pola tersebar dan pembobotan yang beragam. Dalam upaya mendukung terwujudnya Profil Pelajar Pancasila, penelitian ini merekomendasikan pemerintah untuk menyesuaikan konten dan muatan agar lebih representatif serta relevan dengan capaian pembelajaran yang terbaru.

Copyright © 2021 (Ravyansah & Fauzi Abdillah). All Right Reserved

How to Cite : Ravyansyah, & Abdillah, F. (2021). Tracing 'Profil Pelajar Pancasila' Within The Civic Education Textbook: Mapping Values For Adequacy. *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, 6(2), 96-105. <https://doi.org/10.21067/jmk.v6i2.5906>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Introduction

Textbooks play a critical role in facilitating student learning in schools (Mumpuni, 2018; Solehudin, 2019). In the context of Pancasila and Civic Education (PPKn), textbooks are developed around a variety of citizenship themes in order to elicit students' interest in becoming good and smart citizens. Cultivating a sense of caring through a community problem or challenge, such that insightful care and active participation result in the development of citizenship skills. Civics textbooks are designed to foster scientific citizenship competence by encouraging students to pay attention, ask questions, collect data, associate and communicate knowledge.

The textbook can be used to raise students' awareness of the nation and state and to help them develop into good and intelligent citizens (Syabrina, 2017). Additionally, the textbook plays a critical role as a strategic medium that shapes students' interests, attitudes, and reasoning. Pancasila and Civic Education textbooks must also include chapters and subchapters on Core Competencies and Basic Competencies, as well as character values.

Haryati and Khoiriyah (2017), Apit Insasi and Muhkamad Murdiono (2019), and Arif Kristiyono (2019) have all conducted research on analyzing character values in PPKn textbooks (2013). Additionally, research on the content analysis of Pancasila Student Profiles in PPKn textbooks at the junior high school level is urgent due to the novelty and relevance of mapping the Pancasila Student Profiles' character values, which can be used as a current need in the context of developing Civics textbooks at the junior high school level.

Until now, the theme of Civics textbooks has been extensively studied in terms of their value and character content (Adi, 2018; Astuti & Wuryandani, 2017; Ayudi, 2019; Caraswati, 2014; Haryati & Khoiriyah, 2017; Insasi & Murdiono, 2019; Ismail et al., 2021; Mardikarini & Suwarjo, 2016; Mumpuni & Masruri, 2016; Rahayuningtyas & Mustadi, 2018). The existing research examines the suitability and feasibility of the Civics subject's orientation and objectives. Meanwhile, research on the 'Profil Pelajar Pancasila' remains limited to the context of character education policies (Ismail et al., 2021; Juliani & Bastian, 2021), the development of learning media (Hidayah et al., 2021), and the response of history subjects to it (Hasudungan & Abidin, 2020).

Imperatively, education programs in Indonesia as a whole must achieve the 'Profil Pelajar Pancasila' (Pancasila Student Profile). This is in relation to the emergence of the Minister of Education and Culture of the Republic of Indonesia Number 22 in 2020 regarding the Ministry of Education and Culture's Strategic Plan for the Years 2020–2024 (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024). PPKn cannot be separated from this critical mission as part of the curricular program at various levels of education. Textbooks on civics subjects, like other curricular programs, are media that are still being used and programmed for development. So, after reviewing the previous book, this study can provide input to make it more empowered, impactful, and relevant to the Pancasila Student Profile's purpose. As evidenced by the scholarship associated with the PPKn textbook and the achievement of the Pancasila Student Profile, the existing literature has not placed a high premium on this constellation. This study contributes to the creation of an ecosystem of book development that is programmatic and sustainable, in addition to strategies for more efficient and targeted curricula and books. As a result of this problem, the research question is how to map the *Profil Pelajar Pancasila's* character values into PPKn textbooks for class IX Junior High Schools.

Methods

This study employs a qualitative approach in accordance with content analysis, employing a non-interactive qualitative method to examine Civics textbooks for class IX junior high school (JHS). The subject of the research is the junior high school Civics Class IX textbook. The data collection was identified and analyzed using the Pancasila Student Profile character values found in the textbook. Validation of data is accomplished through semantic validity, specifically by observing the data in the introduction, which includes motivational sentences and learning objectives. This technique is used for symbolic interpretations relevant to the context of the Pancasila Student Profile that appear in the book, whether in the form of material content, pictures, case examples, or other things. The core sections include a description of the instructional materials, information about citizenship, group assignments, and independent assignments. The concluding section contains a reflective exercise, an attitude assessment, a citizenship project, and a competency test. Then, interrater reliability was used in this study by reading and reviewing the data in order to obtain consistent or appropriate data. The data was validated for validity using semantic validity, inter-rater reliability, and expert review. The analysis technique used in this research is mapping and analyzing the load on the Pancasila Student Profile character values found in the textbook.

Findings and Discussion

Regarding research on the Pancasila Student Profile, several researchers have done so, including Ismail, Suhana, and Zakiah (2020) on the KDP policy analysis for implementing Pancasila students in schools and Hasudungan & Abidin (2020) on the formation of Pancasila Student Profiles through history learning. According to Kristiyono, research on the content analysis of Pancasila Student Profiles in junior high school textbooks demonstrates that this research can fulfill and achieve the importance of textbooks for junior high schools (Kristiyono, 2013). This is supported by research that books foster the development of all analyzed character values (Mardikarini & Suwarjo, 2016; Rahayuningtyas & Mustadi, 2018).

The mapping analysis reveals that the Pancasila Student Profile has been omitted from the PPKn textbooks for junior high school. The distribution of character values is also found in each chapter, as previous research (Insasi & Murdiono, 2019; Kristiyono, 2013) used analytical percentages in their studies. Additionally, it was discovered that many of these values were not accompanied by examples of their application, as evidenced by Adi (2017) research findings, which are deficient in indicators for all aspects of character values. Because character values are connected to character education, it can be respected by other nations and a nation that can firmly adhere to its own noble values (Arifin, 2018), and also strengthening character education and the hope of creating Student Profiles Pancasila is a genuine effort to realize the *Nawacita* program (Siswanto, 2021).

Discussing character entails discussing the value manifested in one's actions; it is not sufficient for a person to understand value; it must also manifest in the desire to do good and do good. According to Thomas Lickona, a person's character is always measured in three ways: knowledge of the good (knowing the good), love and liking of the good (desiring the good), and action of the good (doing the good). Even these three aspects must develop into habits: the habit of always thinking about the positive or the good, the habit of liking the good, and the habit of always doing the good (Lickona, 2016).

A good character consists of knowing what is right, desiring what is right, and acting on what is right. According to Arifin (2018), the quality of something that makes it likable, desirable, useful, and appreciated to the point where it becomes a kind of object for specific interests. Furthermore, Haryati & Khoiriyah (2017) discovered that the content of national character values developed by the Ministry of Education and Culture is presented in three parts in the Pancasila and Civic Education textbook for grade VIII JHS, the first in the introduction, the second in the core, and the third in the cover. Thus, the results of mapping the *Profil Pelajar Pancasila's* contents to the PPKn textbook revealed values that are sporadically owned and described.

Through the draft of the Indonesian Education Roadmap 2020-2035, the Ministry of Education and Culture established a Vision for Indonesian Education 2035, which is to develop Indonesian people into excellent lifelong learners who continue to develop, prosper, and exhibit noble character through the cultivation of Indonesian cultural values and Pancasila.

National Education's function and purpose are defined in Chapter 2 Article 3 of Law No. 20 of 2003 on the National Education System, which states that National Education's purpose is to develop the capabilities and shape the character and civilization of a dignified nation within the context of educating the nation's life, with the goal of developing potential students into human beings. This is demonstrated by the existence of multiple frameworks for the *Profil Pelajar Pancasila's* character values.

According to Article 37 of the applicable National Education System Law, citizenship education is a mandatory subject in Indonesia's primary and secondary education curricula, as well as in Pancasila and Civic Education, which is expected to serve as an educational vehicle for developing students into human beings with a sense of nationality and citizenship. Nationalism is imbued with Pancasila values, the Republic of Indonesia's 1945 Constitution, the Spirit of Unity in Diversity, and the commitment of the Unitary State of the Republic of Indonesia.

This is because the integrated learning process in Civics subjects has met the Pancasila Student Profile and is consistent with Fathurrohman, Suryana, and Fatriani (2013) definition of the critical pillars of human character that can be used to assess and measure character and behavior (Rohman & Munir, 2018). Pancasila and Civic Education as a subject is intended to mold students into citizens with a sense of national identity and love for their homeland in the context of Pancasila values and morals, awareness of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika values and spirit, and the State's commitment. Indonesia is a unitary republic.

According to the Ministry of Education and Culture's strategic plan for 2020-2024, the first Pancasila student should possess faith, fear of God Almighty, and a noble character. Students from Indonesia who believe, fear God Almighty, and possess a noble character. Which is a student who possesses moral character in his interactions with God Almighty. He comprehends religious teachings and beliefs and incorporates them into his daily life. Faith, fear of God Almighty, and noble character are comprised of five essential components: religious character, personal character, morality toward humans, morality toward nature, and state character. This relates to the President's vision and mission to realize an advanced Indonesia that is sovereign, independent, and self-aware through the development of a Pancasila Student Profile that is critical, creative, self-aware, faithful, devoted to God Almighty, and possesses noble character, mutual cooperation, and global diversity.

As a result, the Minister of Education and Culture's policy prioritizes character education and the practice of Pancasila, while also stating that an essential component of character education is morals, and Pancasila is one of the frameworks for character education. Thus, Utami (2019) makes it abundantly clear that, as an essential component of character education, values and principles of life based on these five precincts are included.

The *Profil Pelajar Pancasila's* six characteristics can be realized through the growth and development of Indonesian cultural values and Pancasila, which serves as the bedrock for all national development directions. Then, with the characteristics of Indonesian culture and Pancasila values embedded in Indonesian society, the country can move forward as an open society and global citizen capable of accepting and utilizing the diversity of sources, experiences, and values from the world's diverse cultures. This society will retain its unique characteristics and characteristics through an open society and global citizenship. This is consistent with definition of collaboration as "understanding how to collaborate" or "gotong royong" or "working together," respect for diversity, and a sense of tolerance for differences (Riyanto, 2020).

The research findings regarding the contents of the first Pancasila Student Profile include dimensions and elements such as religion and personal morals, indicating that the first Pancasila Student Profile is a fundamental value. Each chapter and discussion should contain a religious message that adheres to the first precepts of belief in the One Supreme God and can be applied in a variety of ways to the learning objectives, the educational process, or motivation. This can be expressed through the description of the characters formed during the learning process.

Global diversity is the focus of the second Pancasila Student Profile. Indonesian students uphold their noble culture, locality, and identity while maintaining an open mind when interacting with other cultures, fostering mutual respect and the possibility of forming a new culture that is positive and complementary to the nation's noble culture. Global diversity encompasses critical components such as recognizing and appreciating cultures, developing intercultural communication skills when interacting with others, and reflecting on and taking responsibility for one's own experience of diversity.

Through the dimensions and elements of the second Pancasila Student Profile that incorporate global diversity, there is an emphasis on recognizing and appreciating culture, with the principle that the character of global diversity must be taught in every lesson (Fathurrohman et al., 2013). Citizenship-civic duty is a critical human characteristic that can be used to measure and assess a person's character and behavior.

The research findings identified the second Pancasila Student Profile as a form of encouragement to love the Indonesian state with diversity in the *Bhinneka Tunggal Ika* frame has a diversity of ethnicities, nations, religions, races, and group differences that are consistent with Riyanto's (2020) understanding of how to collaborate or gotong royong or cooperate, respect diversity, and have a sense of toleran. With the strengthening of dimensions and elements, such as recognizing and appreciating culture, and encouraging people to love the diverse Indonesian state within the framework of *Bhinneka Tunggal Ika*, which is diverse in terms of ethnicity, nation, religion, race, and class, This is consistent with one of the critical pillars of human character that can be used to measure and assess character and behavior, namely respect, as identified by Fathurrohman, Suryana, and Fatriani (2013).

The third Pancasila Student Profile complements the previous two. An Indonesian student who possesses the ability to collaborate, that is, the capacity to carry out activities cooperatively

in order for the activities to run smoothly, easily, and lightly. Collaboration, concern, and sharing are all components of gotong royong.

The content of this third Pancasila Student Profile is related to the third Pancasila Unity of Indonesia principle. Theoretically, gotong royong is a character value that must be developed throughout the educational process; in essence, the character of gotong royong is developed through the application of critical character pillars, as identified by Fathurrohman, Suryana, and Fatriani (2013), namely caring and a willingness to share (caring). Gotong royong refers to the most critical skills or competencies, while chance (opportunity) refers to the opportunity to collaborate and the ability to work in a team (Hermawan, 2021). This can be accomplished through civic projects, assignments, or through the use of materials. In practice, it has been conveyed comprehensively through a variety of modes of instruction or approaches to learning. Pancasila's fourth student profile is self-contained. Independent students are those who are accountable for their own learning process and outcomes. The critical components of independence are self-awareness and self-regulation.

In the form of mapping research findings, the fourth Pancasila Student Profile is comprised of learning descriptions, independent assignments, reflections, attitude assessments, citizenship projects, and competency tests. *Mandiri* is a character that is intended to be developed in Civics education in order to carry out the fifth principle of social justice for all Indonesians. This is consistent with the findings of Fathurrohman, Suryana, and Fatriani (2013) regarding one of the critical pillars of human character that can be used to assess and measure character and behavior, namely fairness. Independence is a strong character trait that requires effort, discipline, and consistency in habituation efforts, which means that various approaches or modes of instruction must be used, including independent assignments, attitude assessments, motivational sentences, reflections, and citizenship projects. Practically, the mapping's results are quite good because they comprehensively describe the efforts involved in the "self-reliance" learning process.

Critical reasoning is the fifth Pancasila Student Profile (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, 2020). Students who think critically are capable of objectively processing information on both a qualitative and quantitative level, establishing relationships between disparate pieces of information, analyzing, evaluating, and concluding on that information. Critical reasoning consists of the following components: acquiring and processing information and ideas, analyzing and evaluating reasoning, reflecting on one's own thoughts and thought processes, and making decisions.

The research findings regarding the contents of the fifth Pancasila Student Profile are contained in motivational sentences, learning objectives, descriptions of learning materials, citizenship information, group assignments, independent assignments, reflections, citizenship projects, and competency tests, all of which have dimensions and elements such as acquiring and processing information and ideas. Second, conduct an analysis and evaluation of the reasoning. Thirdly, he expresses his own thoughts. Thus, critical reasoning is a character trait that the Indonesian people, according to (Lickona, 2016) require in this global and digital era through moral knowledge in the manifestation of moral values that have become a reality of life in order to be able to face various problems and make decisions. Through the literature, we can learn about the process of producing learners who are capable of developing relationships, communication, presentation, intercultural sensitivity, ethics, listening, and asking questions (Denni & Pratomo, 2020).

As a result, this character must pervade all aspects of the learning process, including learning objectives, motivation, materials, assessment, group and independent assignments, and civic projects, among others. Practically, the mapping results have been able to describe the critical reasoning character as a significant character, and Utami makes it abundantly clear that it is also one of the frameworks for character education (Utami, 2019).

Pancasila's sixth student profile is innovative. Students who are creative are capable of modifying and producing something unique, meaningful, useful, and impactful. The critical

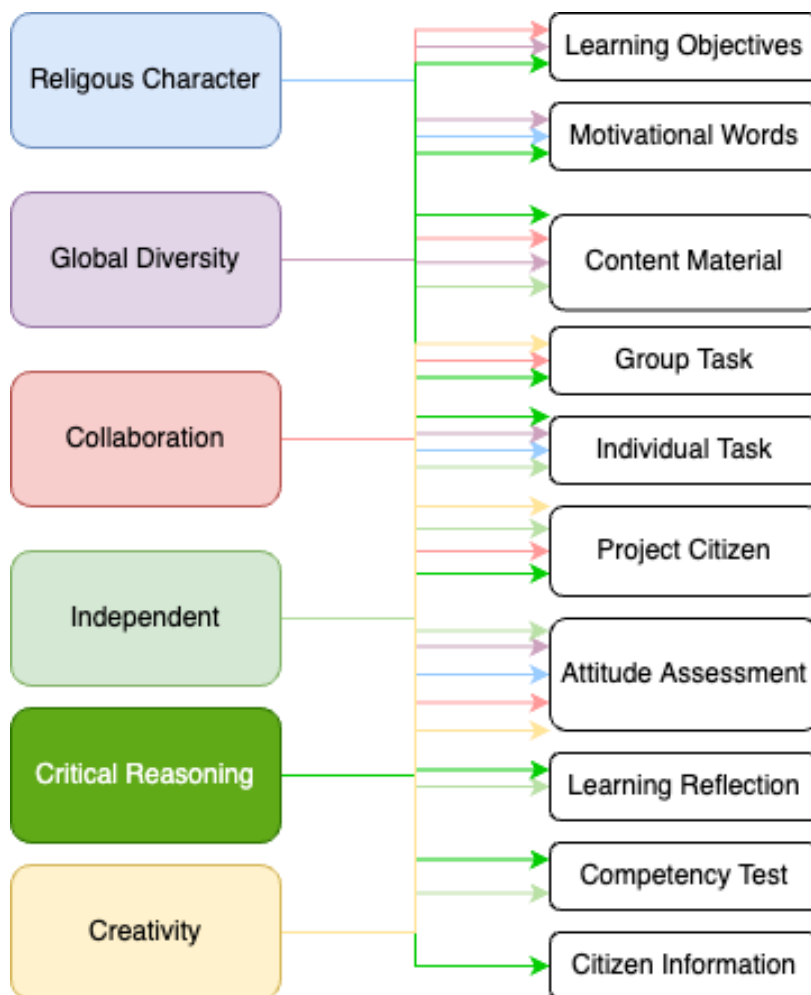


Figure 1 'Profil Pelajar Pancasila' Values Map identified in the textbook

component of creativity is the generation of unique ideas and the creation of unique works and actions.

In the form of mapping research findings, the sixth Pancasila Student Profile is found in group assignments, citizenship projects, and assessments of student attitudes and behavior. This sixth Pancasila Student Profile is creative; a creative character is one that can motivate a citizen to pursue his or her life goals in accordance with his or her life vision and mission. Of course, creative characters require a very strict habituation process to be successful, which means that various approaches to learning must be used. This is done to ensure that Adi (2017) research on learning evaluation is optimal. Of course, in an ideal world, all learning would require this creative quality. Both in the learning process and in other areas, such as individual and group assignments, civic projects, motivation, and reflection. This creative quality is also reflected in the embodiment, as one of the objectives of the program is to develop the potential of creative students.

In practice, it has described books that promote creative characters, though additional approaches should be developed in each learning material (Wakhidah & Setiawan, 2015). The position of this textbook, which contains the *Profil Pelajar Pancasila's* character values, has been identified as one that can aid in the realization of these character values.

This is a manifestation of education as a process of humanization and character development, in which humans are humanized. Thus, the embodiment must be pertinent to Pancasila. Additionally, education teaches morals, ethics, and character, all of which contribute to the formation of national identity. Thus, the quality of education is largely determined by the presence of strong characters capable of developing into a nation of character.

Textbooks written in the PPKn format play a critical role in the implementation of student learning in schools. This is because civic education is structured around activities that cover a variety of civic themes in order to encourage and motivate students to become good citizens through a sense of concern for the problems and challenges faced by the surrounding community, which can be demonstrated through active participation and community development. As a result, the resulting competencies are no longer limited to knowledge and skills, but also to written works. However, it places a premium on the development of concrete behaviors and actions that each student can implement.

In general, this textbook has been able to describe the *Profil Pelajar Pancasila's* character values and how they support its realization (see Figure 1). Although textbooks must still be developed, completed, and sharpened on each learning material using a variety of complementary approaches. This statement refers to research conducted by Wakhidah and Setiawan (2015), which found that textbooks alone are insufficient to encourage scientifically based learning activities.

Through the objectives of civics subjects at the primary and secondary levels in general, namely developing students' potential in all dimensions of citizenship, including (1) civic attitudes, including constancy, commitment, and responsibility (civic confidence, civic commitment, and civic responsibility), (2) civic knowledge, and (3) civic skills, including civic competence and civic responsibility.

Then, specifically, the purpose of Civics is to enable students to: (1) demonstrate characters that reflect their personal and social appreciation, understanding, and practice of Pancasila values and morals; (2) demonstrate a constitutional commitment that is backed up by a positive attitude and a thorough understanding of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. In other words, the mapping and analysis of the Pancasila Student Profile in the JHS grade IX PPKn textbooks is still not evenly distributed throughout each chapter and sub-chapter, which is divided into an introduction, a core, and a concluding section.

This is consistent with the findings of Insasi & Murdiono (2019) regarding the content of the Ministry of National Education's 18 character values, the distribution of which is not exhaustive in each chapter and subchapter, and Mumpuni & Masruri (2016) regarding teacher handbooks and student handbooks containing value content. Characters with a variable number and an asymmetrical distribution.

Various scattered patterns and weightings have been identified as a result of the mapping of the values. Exteriorization of values is dispersed and weighted differently in this Civics Education book, which follows the outline of the material and competencies to be attained. Embodiment using this pattern will process differently depending on how the teacher presents and functions books in learning. As a result, if you refer to the *Profil Pelajar Pancasila*, the

distribution of this value may have a constellation that is also commonly found in civic books at other levels. On the other hand, the expression of values must be adjusted so that the *Profil Pelajar Pancasila* accurately represents the purpose.

Conclusion

Two conclusions are drawn from this study. To begin, the effort to map the *Profil Pelajar Pancasila*'s character values is identified in the Efforts to map the *Profil Pelajar Pancasila*'s character values section, which is also identified in the introduction, core, and closing sections. These values are detailed in the following sections: motivational sentences, learning objectives, descriptions of learning materials, citizenship information, group assignments, and independent assignments. Meanwhile, in the concluding section, students reflect on their character values through attitude assessments, citizenship projects, and competency tests. The text book that was identified as a result of the *Profil Pelajar Pancasila*'s character values has been identified and can assist in the realization of the Pancasila Student Profile. In general, this textbook contains the *Profil Pelajar Pancasila*'s character values, which support its realization, though it should be further developed and supplemented by sharpening each learning material with a variety of approaches.

References

- Adi, Y. K. (2018). Analisis Muatan Pendidikan Karakter Dalam Buku Teks Kurikulum 2013 Kelas III SD Semester 1. *Profesi Pendidikan Dasar*, 1(1), 23. <https://doi.org/10.23917/ppd.viii.3754>
- Arifin, M. (2018). *Pendidikan Karakter dalam Perspektif YAM*. Deepublish.
- Astuti, H. P., & Wuryandani, W. (2017). Analisis Nilai-Nilai Karakter Pada Buku Teks Pegangan Guru dan Siswa Kelas IV Semester 1 Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 7(2), 226–239. <https://doi.org/10.21831/jpk.v7i2.17378>
- Ayudi, M. D. (2019). *Analisis Muatan Sikap Spiritual dan Sikap Sosial dalam Buku Teks PPKn Kurikulum 2013: Studi Deskriptif Buku Teks PPKn SMA Kelas X Kurikulum 2013*. Universitas Pendidikan Indonesia.
- Caraswati, S. (2014). *Analisis Isi Buku Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Kurikulum 2013 Dalam Pembentukan Karakter Bangsa Pada Siswa SMP*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Denni, A., & Pratomo, T. P. (2020). *Learning 5.1. (P. Benedanto, Penyunt.)*. Kepustakaan Populer Gramedia.
- Fathurrohman, P., Suryana, A., & Fatriani, F. (2013). *Pengembangan Pendidikan Karakter. (A. Gunarsa, Penyunt.)*. PT Refika Aditama.
- Haryati, T., & Khoiriyah, N. (2017). Analisis Muatan Nilai Karakter dalam Buku Teks Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP Kelas VIII. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 7(1), 1–9. <https://doi.org/10.21831/jpk.v7i1.15493>
- Hasudungan, A. N., & Abidin, N. F. (2020). Independent Learning: Forming The Pancasila Learner Through Historical Learning In Senior High School. *Seminar Nasional Pembelajaran Sejarah (SNPS UNS 2020)*, 3(2), 34–42.
- Hermawan, B. (2021). *Soekarno Inspirasi Nadiem Rumuskan Profil Pelajar Pancasila*. <https://republika.co.id/berita/qvho4w354/soekarno-inspirasi-nadiem-rumuskan-profil-pelajar-pancasila>
- Hidayah, Y., Suyitno, S., & Ali, Y. F. (2021). A Study on Interactive–Based Learning Media to Strengthen the Profile of Pancasila Student in Elementary School. *JED (Journal of Etika Demokrasi)*, 6(2), 283–291.
- Inasi, A., & Murdiono, M. (2019). Analisis Muatan Nilai-Nilai Karakter dalam Buku Teks Mata Pelajaran PPKn Kelas VII. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Dan Hukum*, 8(7), 703–706.

- Ismail, S., Suhana, S., & Zakiah, Q. Y. (2021). Analisis Kebijakan Penguatan Pendidikan Karakter Dalam Mewujudkan Pelajar Pancasila Di Sekolah. *Jurnal Manajemen Pendidikan ...*, 2(1), 76–84.
- Juliani, A. J., & Bastian, A. (2021). Pendidikan Karakter sebagai Upaya Wujudkan Pelajar Pancasila. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Pgris Palembang*, 257–265.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. (2020). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024.
- Kristiyono, A. (2013). *Analisis Isi (Content Analysis) pada Buku Teks Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Kelas VII SMP*. Universitas Negeri Semarang.
- Lickona, T. (2016). *Mendidik untuk membentuk karakter: bagaimana sekolah dapat memberikan pendidikan tentang sikap hormat dan bertanggung jawab*. (U. Wahyudin & Suryani, Eds.). Bumi Akasara.
- Mardikarini, S., & Suwarjo, S. (2016). Analisis Muatan Nilai-Nilai Karakter Pada Buku Teks Kurikulum 2013 Pegangan Guru Dan Pegangan Siswa. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 6(2), 261–274. <https://doi.org/10.21831/jpk.v6i2.12057>
- Mumpuni, A. (2018). *Integrasi nilai karakter dalam buku pelajaran: Analisis konten buku teks kurikulum 2013*. Deepublish.
- Mumpuni, A., & Masruri, M. S. (2016). Muatan Nilai-Nilai Karakter Pada Buku Teks Kurikulum 2013 Pegangan Guru Dan Pegangan Siswa Kelas II. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 1, 17–28. <https://doi.org/10.21831/jpk.voi1.10728>
- Rahayuningtyas, I. D., & Mustadi, A. (2018). Analisis Muatan Nilai Karakter Pada Buku Ajar Kurikulum 2013 Pegangan Guru Dan Siswa Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 8(2), 123–139. <https://doi.org/10.21831/jpk.v8i2.21848>
- Riyanto, A. (2020). *6 Profil Pelajar Pancasila Program Penguatan Pendidikan Karakter*. AMONG GURU. <https://www.amongguru.com/6-profil-pelajar-pancasila-program-penguatan-pendidikan-karakter/>
- Rohman, F., & Munir, A. A. (2018). Membangun Kerukunan Umat Beragama dengan Nilai-Nilai Pluralisme Gus Dur. *An-Nuha*, 5(2), 155–172.
- Siswanto, R. (2021). *Profil Pelajar Pancasila Mewujudkan Program Nawacita*. Suyanto.Id. <https://suyanto.id/profil-pelajar-pancasila-mewujudkan-program-nawacita/>
- Solehudin, I. (2019). *Analisis Buku Teks PPKn Kelas VII dalam Perspektif Penguatan Pendidikan Karakter*. Universitas Pendidikan Indonesia.
- Syabrina, M. (2017). Menumbuhkan Karakter Tanggung Jawab Melalui Buku Ajar Tematik Integratif Berbasis Karakter. *Madrasah*, 10(1). <https://doi.org/10.18860/madrasah.v10i1.5093>
- Utami, L. D. (2019). *Penjelasan Nadiem Makarim Tentang Pendidikan Karakter*. Tribunnews.Com. <https://www.tribunnews.com/nasional/2019/11/30/penjelasan-nadiem-makarim-tentang-pendidikan-karakter>
- Wakhidah, H., & Setiawan, D. (2015). Analisis Kelayakan Buku Teks Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas VII Kurikulum 2013. *JURNAL TEMATIK*, 4(3), 235–246. <https://doi.org/https://doi.org/10.24114/jt.v4i03.3164>

